

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
TRANSFORMATIF**
Integritas Moral, Dialogis, dan Adil

ISNARMI MOEIS



UNP PRESS
2014

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
TRANSFORMATIF**
Integritas Moral, Dialogis, dan Adil
ISNARMI MOEIS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

ISNARMI MOEIS
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRANSFORMATIF
Integritas Moral, Dialogis, dan Adil
/ISNARMI MOEIS
editor, Tim editor UNP Press
Penerbit UNP Press Padang, 2014
1 (satu) jilid; 14 x 21 cm (A5)
193 hal.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRANSFORMATIF
Integritas Moral, Dialogis, dan Adil
ISBN: 978-602-8819-94-7
1. Pendidikan
1. UNP Press Padang

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRANSFORMATIF
Integritas Moral, Dialogis, dan Adil

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang pada penulis
Hak penerbitan pada UNP Press

Penyusun: Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A
Editor substansi: Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D
Editor Bahasa: Dr. Novia Juita, M.Hum.
Desain Sampul & Layout Nasbahry Couto & Khairul

PRAKATA

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, bahasa dan dialek, budaya, dan agama. Keragaman ini telah lahir bersama dengan bangsa dan negara Indonesia, dan bahkan merupakan unsur pembentuk negara dan bangsa Indonesia. Secara otomatis bangsa Indonesia sesungguhnya sudah hidup berdampingan dalam kerangka keragaman atau dalam istilah lain multikultural.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa menuju terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai *multicultural* telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sekaligus kehidupan politik bangsa Indonesia. Bahkan pendiri negara menyadari benar hakikat keragaman bangsa Indonesia dengan menyatakan dalam satu slogan yang sarat dengan nilai yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu.

Namun ketika interaksi masyarakat semakin meluas, disertai kemajuan teknologi, kemajuan dalam pemikiran dan segala aspek kehidupan, nilai-nilai multikultural yang sudah menjiwa dalam kehidupan bangsa seolah-olah terhapus. Kehidupan masyarakat yang tenteram, saling menghormati, hidup berdampingan dalam perbedaan, berubah menjadi saling mencurigai dan bahkan permusuhan. Sejak lima tahun belakangan hingga dewasa ini, konflik antar kelompok yang berbeda semakin meningkat baik dari segi jumlah atau atau segi rentang waktu penyelesaiannya.

Barangkali setiap orang yang paham sejarah bangsa ini akan selalu bertanya apa yang menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan nilai-nilai perekat kebersamaan dalam kehidupan sebagaimana pernah ada di masa lalu. Siapa yang bertanggungjawab atas kehilangan nilai yang sangat berharga ini.

Alhamdulillah, berkat rahmat ALLAH SWT telah tersusun sebuah buku yang diharapkan membantu orang-orang yang peduli tentang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dari kalangan pendidikan. Buku ini berangkat dari penelitian

(disertasi tahun 2005) tentang pemberitaan media massa mengenai konflik antar kelompok yang terjadi pada awal tahun dua ribuan, Maksud dari kajian penelitian tersebut adalah untuk melihat esensi dari pemicu konflik yang terjadi pada waktu itu. Satu hal yang menarik dari analisis laporan itu, adalah bahwa konflik bagi kalangan masyarakat umum yang berada dalam konflik seolah terjadi seperti bencana alam. Selama ini mereka hidup dengan tenteram, damai, tidak ada kecurigaan antar kelompok, kalau ada perselisihan kecil, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi tiba-tiba masing-masing kelompok saling menyerang dan pembunuhan, diawali dengan sedikit isu, berujung pada saling menyerang. Eskalasi pertikaian begitu cepat berubah menjadi perang antar kelompok. Simpulan yang dapat diambil dari kajian penelitian tersebut adalah bahwa nilai-nilai multikultural yang sudah dan pernah ada dalam kehidupan masyarakat perlu diperkuat lagi melalui kajian-kajian reflektif dan kritis. Setiap orang diajak untuk belajar merefleksi seberapa jauh nilai identitas diri, dan kelompok mempengaruhi cara berfikir masing-masing individu dan kelompok ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda; seberapa kuat pengaruh tersebut membentuk cara berfikir positif dan negative dalam menciptakan hubungan dengan orang lain yang berbeda. Pada akhirnya kesadaran reflektif ini akan membantu setiap orang atau kelompok membangun kedewasaan kepribadian diri dalam bersikap, dan bertindak pada situasi kehidupan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dari segi budaya, suku, bahasa, dan agama. Kedewasaan kepribadian disebut dalam buku ini sebagai kedewasaan kepribadian multikultural.

Buku ini merupakan buku teks pendidikan multikultural, yang dapat dibaca oleh semua orang yang berminat untuk meneliti dan mengkaji, atau mengajar atau mendalami bidang pendidikan multikultural di sekolah, atau di masyarakat. Selain itu juga berguna bagi para pembaca yang menyadari bahwa tanggung jawab ketenteraman dalam masyarakat yang beragam, adalah terletak pada cara berfikir dalam diri tentang orang lain yang berbeda.

Bab 1 buku ini merupakan latarbelakang yang menggambarkan tentang permasalahan yang ada dalam masyarakat majemuk Indonesia. Kajian permasalahan ini dimulai dengan kajian tentang berita konflik yang diungkap oleh media massa. Dari analisis berita

tentang konflik ditemukan karakteristik konflik yang terjadi dalam berbagai peristiwa konflik antar kelompok di Indonesia. Karakteristik ini merupakan titik berangkat untuk menentukan arah pendidikan multikultural dalam masyarakat Indonesia.

Bab 2 buku ini berbicara tentang peristilahan dan tujuan pendidikan multikultural. Tujuan penulisan bagian ini adalah sebagai upaya menghilangkan kesalahpahaman makna multikultural dan pendidikan multikultural. Selain itu juga dibahas dalam bagian ini perbedaan prinsip antara penggunaan kata multikultural dan kata plural. Sebagai panduan bagi pembaca yang beregerak dibidang pembelajaran, juga dikemukakan pada bagaian ini cara-cara pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pendidikan Pendidikan kewarganegaraan.

Bab 3 berbicara tentang model pengelolaan masyarakat multikultural. Ada dua sisi fenomena dalam masyarakat multikultural yang menjadi perhatian di sini yaitu konflik dan identitas kelompok. Pengelolaan kedua aspek tersebut berkaitan dengan cara-cara pemerintah menyelenggarakan kekuasaan dengan system demokrasi atau tidak demokrasi. Keduanya membawa implikasi kepada kondisi masyarakat apakah mengandung konflik atau tidak.

Bab 4 berbicara mengenai filsafat rekonstruksi social sebagai landasan pendidikan multikultural transformative. Kekhasan dalam pemikiran filsafat rekonstruksi social adalah proses transformasi yang dimulai dari pengembangan kesadaran diri, kemudian upaya perubahan diri dan lingkungan atau system. Proses ini dilakukan secara reflektif kritis. Pendidikan multikultural transformative adalah pendidikan yang mengajak peserta didik untuk belajar merubah keadaan dengan memulai dari perubahan pada cara berfikir sendiri yang menyumbang kepada ketidak harmonisan dalam masyarakat.

Bab 5, berisi tentang rasional dan konsep dasar pendidikan multikultural yang akan dikembangkan baik di sekolah atau di masyarakat. Landasan rasional ini bertolak dari kajian tentang konflik yang berkembang akhir-akhir ini, dan upaya yang mungkin dilakukan agar bangsa Indonesia ke depan dapat hidup dalam kondisi tenteram sebagaimana pernah terbukti di masa lalu.

Bab 6, menyajikan sisi lain dari pendidikan multikultural yakni peranan media massa. Media massa memilikipotensi yang baik bagi pendidikan multikultural. Dalam bab ini dibicarakan hubungan media massa dengan pendidikan, dan kemampuan membaca kritis sebagai upaya membawa media massa ke dalam kelas sebagai media pembelajaran kritis.

Buku ini hadir ke tangan pembaca dengan harapan dapat membuka fikiran kritis, bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki kontribusi bagi terciptanya kedamaian atau perpecahan dalam masyarakat. Karena itu, cara terbaik untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai adalah dengan dimulai dari diri sendiri. Tempat yang paling strategis untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengoreksi diri dan memperbaiki adalah pendidikan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof Dasman Lanin, yang telah membca naskah buku ini, dan memberi sumbangan pemikiran untuk perbaikan penulisan buku ini. Demikian juga kepada pihak terkait di Universitas Negeri Padang yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan penulisan buku teks selama dua hari.

Terakhir, buku ini lahir berkat dorongan dan doa dari Suami dan Ibunda tercinta. Semoga ALLAH merahmati orang-orang tercinta ini.

Padang, 25 Januari 2014

Isnarmi Moeis, Dr, M.Pd, M.A

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PERMASALAHAN DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ringkasan Temuan Analisis Berita Konflik dari Media Massa.....	13
C. Metodologi	22
D. Daftar Bacaan	24
BAB II TERMINOLOGI DAN TUJUAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	27
A. Multikultural	29
B. Pendidikan Multikultural.....	46
C. Daftar Bacaan	60
BAB III MODEL PENGELOLAAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL	63
A. Identitas Kelompok dan Masyarakat Multikultural.....	63
B. Kerangka Hipotetik Mengelola Konflik.....	78
C. Daftar Bacaan	89
BAB IV PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA.....	94
A. Rasional Pendidikan Multikultural di Indonesia:.....	94
B. Filsafat Rekonstruksi Sosial dan Pendidikan Multikultural.....	107
C. Daftar Bacaan	119
BAB V KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA	123
A. Tinjauan Filosofis.....	123
B. Tinjauan Psikologis	131

C. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Multikultural	137
D. Model Pembelajaran Multikultural	138
E. Strategi Pembelajaran Multikultural	143
F. Daftar Bacaan.....	159
BAB VI MEDIA MASSA DAN PENDIDIKAN	
MULTIKULTURAL	162
A. Pendidikan Melek Media (<i>Media Literacy</i>)	162
B. Peran Analisis Wacana Kritis (<i>Critical Discourse</i> <i>Analysis</i>) memahami Teks Media Massa.....	170
C. Landasan Teoritis Analisis Wacana Kritis	172
D. Analisis Wacana Kritis dan Pendidikan Multikultural.....	181
E. Daftar Bacaan.....	184
BAB VII PENUTUP	188
GLOSSARY	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Permasalahan dan Latar Belakang Pendidikan Multikultural	12
2. Kerangka Teoritis Permasalahan	17
3. Alur Berpikir Penelitian dan Penulisan Buku.....	22
4. Kerangka konseptual kedewasaan kepribadian multikultural (Matured Personality).....	45
5. Dimensi Pendidikan Multikultural (adaptasi dari Banks 1999:14)	48
6. Kerangka berfikir pengintegrasian isi pendidikan multikultural ke dalam IPS/PPKn	51
7. Keterkaitan dimensi Pendidikan Multikultural dengan dimensi IPS/PPKn.....	57
8. Model Masyarakat Multikultural	69
9. Hubungan antara Perkembangan Identitas Kelompok,Manajemen Kemajemukan, dan Potensi Konflik.	77
10. Kerangka Hipotetik Hubungan Masyarakat Majemuk.....	89
11. Arah Pendidikan Multikultural.....	135
12. Kontinum perubahan masyarakat.....	135
13. Kerangka Transformasi Diri Model Howard.....	140
14. Model Pembelajaran Multikultural	142
15. Posisi Penelitian CDA dalam Konteks Penelitian Kualitatif	177

BAB I

PERMASALAHAN DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Latar Belakang Masalah

1. Fenomena Keragaman Budaya dan Potensi Konflik

Satu karunia yang membanggakan bagi bangsa Indonesia adalah keragaman budaya yang tersebar dalam beribu-ribu pulau di Indonesia. Keragaman ini berupa keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, yang satu sama lain sangat berbeda, tetapi berada dalam satu Negara bangsa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 665 bahasa daerah, dan 300 suku bangsa yang tersebar pada 17.670 pulau besar dan kecil (www.infop-lease.com/2004). Seiring dengan perkembangan teknologi trans-portasi, keragaman ini semakin berkembang, ditambah dengan sistem masyarakat yang terbuka dengan arus imigrasi bangsa lain yang masuk ke Indonesia. Hal yang lebih membanggakan lagi adalah keragaman itu dikukuhkan dalam konstitusi dan dasar Negara Republik Indonesia di bawah nilai persatuan dengan sebutan Negara Kesatua Republik Indonesia, sehingga keragaman merupakan kekayaan sosial dan kultural bangsa Indonesia.

Di sisi lain ada kekhawatiran. Jika arus keragaman terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan transportasi, maka bentuk keragaman dalam masyarakat akan semakin bervariasi dan setiap orang memiliki akses untuk berubah mengikuti perkembangan. Bila hal ini terjadi, tidak dapat dihindari semakin menipisnya rasa nasionalisme (perasaan satu bangsa), hilangnya kekuatan nilai-nilai tradi-

sional, atau hal paling buruk adalah kehilangan jati diri baik kelompok atau individu.

Selama ini dalam pendidikan, khususnya PIPS (Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, termasuk PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), fenomena keragaman budaya dan etnik dilihat hanya sebagai kebanggaan. Keragaman dibicarakan sebatas potensi kekayaan bangsa yang patut dikembangkan, namun tidak dibahas lebih dalam bagaimana mewujudkan potensi itu menjadi kekayaan yang aktual, dan bagaimana mencegah akibat negatif yang ditimbulkan keragaman tersebut. Dalam satu penelitian tentang kesadaran multikultural guru-guru Sekolah Menengah Atas di Kota Padang tahun 2011-2012 (Moeis dkk) terlihat bahwa pemahaman guru sangat dangkal terhadap makna keragaman. Guru melihat fenomena keragaman budaya (multikultural) hanya sebatas beragamnya budaya seperti adat istiadat, makanan, dan dalam pembelajaran guru memperkenalkan keragaman kepada siswa melalui penampilan rumah-rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah. Dalam konteks kajian keragaman (multikultural) pandangan ini sangat superficial (Summer, 2010.). Pada tahap ini paling sering orang menganggap sebagai multikultural misalnya hanya dengan memajang poster-poster tentang tokoh, serta keunikan dari kelompok tertentu.

Tidak mengherankan bila dewasa ini, kebanggaan terhadap keragaman, dan rasa persatuan dalam keragaman semakin menipis di tengah-tengah banyaknya konflik antar kelompok yang terjadi di Indonesia. Sejak 15 tahun terakhir banyak sekali konflik yang muncul ke permukaan baik bernuansa politik, atau bernuansa etnik, agama, ekonomi, maupun hanya sekedar perwujudan rasa ketidakpuasan antar kelompok. Dalam kurun waktu 4 tahun awal reformasi, berdasarkan data yang dikumpulkan INCIS (www/incis.or.id/2000) telah terjadi berbagai kerusuhan massa, antara lain di Situbondo (Oktober 1996), Tasikmalaya (Desember 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Banyuwangi (September, 1998), Ketapang (November, 1998), Kupang (Desember, 1998), Ambon

dan Sambas (1999). Kerusuhan antar kelompok di berbagai daerah terus berlanjut hingga sepuluh tahun ke depannya seperti kerusuhan di awal-awal tahun 2013 di NTB antar kelompok agama, Berbagai kerusuhan itu dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yakni: a) peristiwa ketegangan antar etnik, b) peristiwa berlatar belakang agama, dan c) pertikaian antar kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pemberitaan media massa mengenai konflik disimpulkan bahwa penyebab utama dari konflik-konflik tersebut adalah: 1) alokasi sumber daya yang tidak seimbang antar kelompok dalam masyarakat; 2) illiterasi pemahaman lintas budaya; 3) provokator dan tindakan premanisme; dan 4) akumulasi kekecewaan terhadap hukum dan kebijakan pemerintah (Moeis, 2006). Meskipun penyebab berbeda, pola perkembangan konflik pada daerah-daerah tersebut hampir serupa satu sama lain yang dimulai dengan persoalan sederhana antar individu dan kemudian membawa kelompok baik atas nama agama atau etnik. Para pakar menjelaskan bahwa penajaman konflik ini karena sudah adanya semacam mekanisme identitas dalam masyarakat seperti misalnya orang dengan agama A, orang agama B dan selanjutnya, begitu juga suku. Pada saat terjadi pertikaian antar individu dari kelompok yang berbeda, identitas ini semakin menguat sebagai wujud solidaritas. Pada saat itu, masyarakat memilih solidaritas berdasarkan ikatan emosional, ketimbangan pemikiran kritis.

Keragaman etnik dan konflik saling mempengaruhi. Bila keragaman etnik tidak dipahami dan dikelola dengan baik maka akan terjadi konflik, sebaliknya bila keragaman terkelola dengan baik, maka konflik dapat dihindari. Oleh karena itu perlu dimengerti bagaimana hakikat keragaman yang ada beserta karakteristiknya untuk dapat dikelola dengan baik.

Keragaman etnik yang dimiliki, negara Indonesia dapat disebut sebagai unik. Sebagaimana diungkap oleh Hardiman, dalam kata pengantarnya pada buku Will Kymlicka, edisi terjemahan (2002), bahwa keunikan itu terlihat dalam kenyataan

di mana selain multi etnik, bangsa Indonesia juga terdiri dari multimental (agama). Karena itu dapat disebut "Indonesia adalah sejumlah bangsa" dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda. Secara historis, ideologi keragaman itu dipertautkan menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama. Sejarah terbentuknya NKRI tahun 1945 membuktikan bagaimana keragaman suku, agama, dan keturunan dipersatukan dalam satu cita-cita bernegara Republik Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 1945 oleh Setneg RI, 1995).

Menurut Kymlicka (2002: 14-18) ada dua pola besar keragaman budaya. Bentuk pertama disebutnya dengan **multi-bangsa**, yakni bergabungnya budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya dan terkonsentrasi secara teritorial, ke dalam negara yang lebih besar. Kebudayaan yang bergabung itu disebut sebagai "minoritas bangsa" yang ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas dan menuntut berbagai bentuk otonomi untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.

Bentuk kedua disebutnya dengan **polietnik** yang terbentuk karena keragaman budaya yang dibawa oleh gelombang imigrasi baik perorangan atau kelompok. Para imigran membentuk komunitas dalam negara yang didatangi sebagai kelompok etnik. Kelompok ini bergabung ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat. Perjuangan mereka adalah mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnik mereka.

Bangsa Indonesia memiliki kedua bentuk keragaman budaya berupa multibangsa dan sekaligus polietnik. Pola yang pertama (multibangsa) terlihat dengan banyaknya sukubangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki karakteristik sendiri dan merupakan bagian dari negara bangsa Indonesia. Pola kedua (polietnik) ditemukan dengan kehadiran bangsa pendatang seperti India, Arab, Cina dan lain-lainnya sehingga membentuk kelompok etnik tersendiri dalam masyarakat. Di beberapa tempat di wilayah perkotaan ditemukan adanya pemukiman yang merujuk kepada etnik tertentu seperti

kampung Cina, kampung Arab, kampung India dan sejenisnya. Selain itu juga ditemukan misalnya pada satu wilayah yang dihuni satu kelompok mayoritas, di dalamnya terdapat kelompok etnik tertentu yang membentuk komunitas sendiri, misalnya di Medan yang dominan etnik Melayu dan Batak, tapi ada etnik Jawa yang memiliki komunitas sendiri.

Dalam pandangan geografi budaya, sesungguhnya kekayaan etnik di Indonesia dapat menjadi potensi yang menguntungkan dalam kemajuan hidup bangsa, jika antar etnik hidup dalam kondisi saling menghormati di bawah payung negara bangsa Indonesia. Di Amerika Serikat (Getis & Getis, 1985: 150) misalnya, keragaman budaya menjadikan geografi budaya Amerika sedemikian kaya yang mencakup suatu jalinan dari suku bangsa yang berbeda, asal usul ras, kesenian, dan etnik. Setiap etnik dapat merayakan dan mengembangkan identitas etniknya. Keragaman ini dipahami dengan baik oleh warganegara.

Secara historis pengelolaan keragaman dalam tataran politik mengalami perkembangan. Pada masa awal kemerdekaan nuansa persatuan dan kesatuan menjadi sangat kental. Setiap orang merasa bahwa persatuan di atas perbedaan. Hal ini yang terlihat ketika perumusan dasar Negara Pancasila sila pertama ada kata-kata: "*kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*" disepakati oleh semua kelompok. Namun ketika akan dikukuhkan menjadi Dasar Negara setelah kemerdekaan, ada keberatan sekelompok penduduk dari bagian timur Indonesia atas pencantuman kata-kata tersebut dalam sila pertama. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan keutuhan persatuan bangsa, maka kelompok muslim menyetujui penghapusan kata-kata tersebut sehingga menjadi Ketuhanan Maha Esa, saja. (Risalah Sidang BPUPK, 1983). Semangat ini terus berlanjut ke masa pemerintahan berikut hingga ke masa orde baru.

Pada masa orde baru seluruh konflik antar kelompok, atau upaya menonjolkan kepentingan kelompok dicurigai sebagai SARA. Hal yang paling diutamakan adalah kebudayaan nasional, yang merupakan puncak kebudayaan daerah, sebagai

wujud persatuan. Hal yang diutamakan adalah persatuan sebagai upaya stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi. Di sisi lain, penekanan pada persatuan tanpa memperhatikan karakteristik keragaman setiap kelompok pada akhirnya menjadi bom waktu yang merusak persatuan itu sendiri, ketika kran kebebasan politik terbuka. Artinya dalam masa pemerintahan orde baru pengelolaan keragaman diletakkan dalam konteks kebudayaan nasional, dengan menekankan pada persatuan.

Setelah reformasi, seiring dengan semaraknya upaya demokratisasi dalam segala aspek, maka mulai muncul berbagai konflik antar golongan baik berupa suku, agama, dan identitas lainnya. Fenomena ini yang telah diungkap pada bagian awal tulisan ini. Ketika konflik muncul, maka timbul berbagai kritik terhadap bentuk pengelolaan kebudayaan yang selama ini diterapkan. Ditenggarai, selama ini dalam pemerintahan RI belum pernah ditetapkan politik kebudayaan yang lengkap, jelas, dan tegas serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Jika ada pada waktu itu keanekaragaman yang muncul ke permukaan, hanyalah sebagai simbol kekuasaan dan sebagai upaya mempertahankan kontrol atas suatu masyarakat yang sangat beragam dan berbeda (Bloomfield cs, 2000: 34). Konsekwensi semua itu adalah kaburnya makna keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman etnik, karena dilebur dalam sistem yang mengutamakan penyeragaman sebagai kontrol dan aturan perilaku masyarakat Indonesia yang beragam. Potensi positif yang ada dalam setiap etnik seyogyanya menjadi kekayaan semua bangsa. Akan tetapi karena selama ini ditekan ke bawah permukaan sehingga menjadi laten, maka pada saat tekanan dilepaskan justru berbalik menjadi sentimen etnik yang setiap saat dapat memicu konflik antara etnik .

Beruntunnya konflik antar kelompok yang terjadi di kalangan masyarakat menarik simpati semua pihak termasuk kalangan pendidik. Dalam penelitian (Moeis dkk, 2011) terlihat bahwa para guru menyadari bahwa terjadinya tawuran antar pelajar adalah cerminan kurangnya sikap penghargaan siswa

terhadap keragaman, atau rendahnya kesadaran multikultural di kalangan siswa. Guru-guru merekomendasikan perlunya pendidikan multikultural dikembangkan di sekolah.

2. Pendidikan Multikultural dan Latar Budaya

Untuk memahami keterkaitan antara pendidikan multikultural dan latar budaya yang melandasinya perlu melihat perbandingan pendidikan multikultural di berbagai Negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Hal ini disebabkan perkembangan keragaman dalam masyarakat menjadikan pendidikan multikultural mendapat perhatian besar di berbagai negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. Tetapi, antara satu negara dengan negara lain memiliki kekhasan tersendiri, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakatnya..

Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan multikulturalisme dan pendidikan multikultural yang berbeda di Amerika, Inggris dan Kanada. Di Amerika pendidikan multikultural identik dengan gerakan multikulturalisme, yang dimulai pada 1950an berupa gerakan *civil rights* atau hak-hak sipil (Parekh, 1997: 170). Persoalan utamanya berawal dari tuntutan asimilasi terhadap komunitas kulit hitam, dan sebagai konsekwensinya komunitas kulit hitam meminta hak politik dan ekonomi yang sama dengan warga kulit putih. Kemudian gerakan ini berkembang menjadi gerakan budaya dan tuntutan di bidang pendidikan yang juga didukung oleh kaum imigran yang berasal dari etnik lain seperti Asia dan Amerika Latin. Satu dari bentuk gerakan ini adalah tuntutan perlunya pendidikan multikultural di sekolah dan perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran pendidikan multikultural di AS pada awalnya dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menghapuskan masalah diskriminasi rasial (Banks, 1997: 96) sekaligus merupakan sebuah gerakan dalam perkembangan masyarakat multikultural Amerika (Bennet, 1995: 13). Bahkan ditegaskan bahwa pendidikan multikultural harus dimasukkan ke dalam PIPS (*Sosial Studies*) dengan dua alasan: 1) untuk mengungkap-

kan kebenaran sejarah Amerika, dan 2) sebagai komitmen terhadap masyarakat demokratis (Banks 1991: 459).

Lain halnya dengan Inggris (Parekh, 1997: 175), gerakan multikultural ditandai dengan kedatangan imigran Karibia dan Asia. Dikarenakan keharusan asimiliasi dengan budaya Inggris, bahasa dan budaya mereka tidak boleh digunakan, dan bahkan anak-anak imigran diperbolehkan bersekolah hanya di tempat yang sedikit kalangan pendatangnya. Bagaimanapun asimilasi dilakukan, warga yang berbeda tetap saja tidak dapat membaaur secara utuh sehingga kaum imigran tetap terisolasi. Akibatnya banyak anak-anak imigran yang rendah prestasi belajarnya. Akhirnya pemerintah Inggris menyadari bahwa perbedaan etnik dan budaya tidak dapat dihilangkan.

Pandangan masyarakat Inggris terhadap isu multikultural berubah drastis sejak era 1950an dengan meningkatnya jumlah imigran dari Negara-Negara Persemakmuran yang memasuki pasar kerja dalam ekonomi Inggris (Watson, 2000: 92). Para imigran membentuk komunitas-komunitas tersendiri terutama di kota-kota besar. Seiring dengan perubahan demografis tuntutan kebebasan budaya terus berkembang dengan munculnya tuntutan kesetaraan yang disuarakan tidak hanya oleh etnik yang berbeda tetapi juga kelas sosial dan penganut agama tertentu serta kelompok gay dan lesbian. Gerakan ini berada pada dua tataran yaitu pertama, menuntut kesamaan perlakuan dalam ruang publik sebagai upaya memerangi diskriminasi yang terlembaga; kedua, lebih radikal lagi menuntut pemenuhan prakondisi yang memungkinkan akses terhadap semua fasilitas sosial dan pendidikan yang ditawarkan dalam masyarakat, serta tuntutan agar pemerintah melakukan intervensi dan tindakan afirmatif untuk mewujudkan prakondisi tersebut. Pada puncak tuntutan adalah perlunya pengakuan oleh negara terhadap perbedaan budaya di tingkat publik, pendidikan, dan bahkan hukum keluarga (*family law*).

Meskipun di Amerika Serikat dan Inggris tampak bahwa pendidikan multikultural sebagai sebuah gerakan perjuangan untuk menghapuskan diskriminasi yang terlembaga, bentuk

pendidikan multikultural di Inggris berbeda dengan Amerika dalam beberapa hal yakni: pendidikan multikultural untuk semua bukan hanya kelompok minoritas; pendidikan multikultural diajarkan ditingkat sekolah tidak termasuk perguruan tinggi; dalam pendidikan multikultural termasuk juga unsur agama, dan tujuan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman antar budaya (Parekh, 1997: 177).

Lain lagi halnya di Kanada lahirnya pendidikan multikultural bersamaan dengan perkembangan kondisi masyarakat Kanada yang memang dari awal sudah terdiri dari berbagai budaya yang berasal dari imigran berbagai negara (Parekh, 1997: 180; Tilaar, 2004: 149). Semula pemerintah menerapkan kebijakan bikultural (kelompok awal dominan Perancis dan Inggris) tetapi kemudian mengembangkan kebijakan multikultural untuk menampung kelompok lainnya, yang dikukuhkan dengan Multiculturalism Act th 1971. Undang-undang ini menegaskan tidak adanya supremasi secara budaya, tetapi adalah hak setiap komunitas budaya untuk mengembangkan identitas komunitas mereka (Gavaki, 1993). Kebijakan ini turut pula mempengaruhi bidang pendidikan.

Demikian pula Australia mengembangkan bentuk pendidikan yang berbeda yang dilatarbelakangi dengan adanya budaya minoritas (suku asli dan pendatang) di satu sisi, dan budaya *mainstream* yang dominan di sisi lain. Disadari bahwa kelompok minoritas aborigin mengalami diskriminasi dan bahkan terkebelakang dalam pendidikan maka kalangan pendidikan mencoba mengembangkan kesadaran multikultural melalui bidang mereka (Partington & McCudden, 1992). Dalam perkembangannya tuntutan keragaman etnik di Australia tidak hanya antara kelompok mayoritas dengan suku aborigin tetapi juga dengan kelompok imigran lainnya.

Masuknya paham multikulturalisme ke dalam pendidikan di Australia sejalan dengan kondisi politik pemerintahan (Tilaar, 2004:159-161). Sehubungan dengan itu ada tiga fase perkembangan pendidikan multikultural di Australia. Pertama, pendidikan untuk kaum imigran, sebagai konsekuensi dari

politik pasif ke arah asimilasi aktif. Dalam periode ini pendidikan untuk kaum imigran bersifat pasif, anak-anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada. Kedua, pendidikan multikultural sebagai konsekuensi kemenangan Partai Liberal dalam pemilu 1972. Pada era 1980an hampir semua propinsi mengadopsi pendidikan multikultural. Ketiga, implikasi ekonomi (hubungan perdagangan Australia dan negara-negara Asia) dalam pendidikan multikultural yang ditandai dengan memasukkan "Program Kajian Asia", ke dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Australia mempunyai kekhasan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan migrasi, ekonomi, masalah etnik, dan kaum imigran.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbedaan pendidikan multikultural di satu tempat dengan tempat lain terkait dengan masalah yang terjadi karena keragaman dalam masyarakatnya, dan perjalanan sejarah gerakan yang muncul untuk mempertahankan keragaman tersebut. Dengan kata lain setiap masyarakat memiliki model-model pendidikan multikultural yang sesuai dengan latar belakang dan tuntutan masyarakatnya.

Di Indonesia sendiri kesadaran bahwa perlu pendidikan multikultural telah lama muncul. Sebagai contoh upaya pengembangan kurikulum berbasis lokal atau *Local Content Curriculum* (Yeom, Acedo, & Utomo, 2002). Namun dalam konteks ini kesadaran multikultural ditampilkan dengan menghidupkan kebudayaan dari setiap etnik pada masing-masing daerah. Tujuan utama dari pendidikan budaya tersebut adalah menjadikan siswa dekat dengan lingkungan. Sejalan dengan penegasan Rochiati Wiriatmadja (2002: 255) "tujuan pendidikan multikultur adalah untuk mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional, dan antar budaya etnik lainnya".

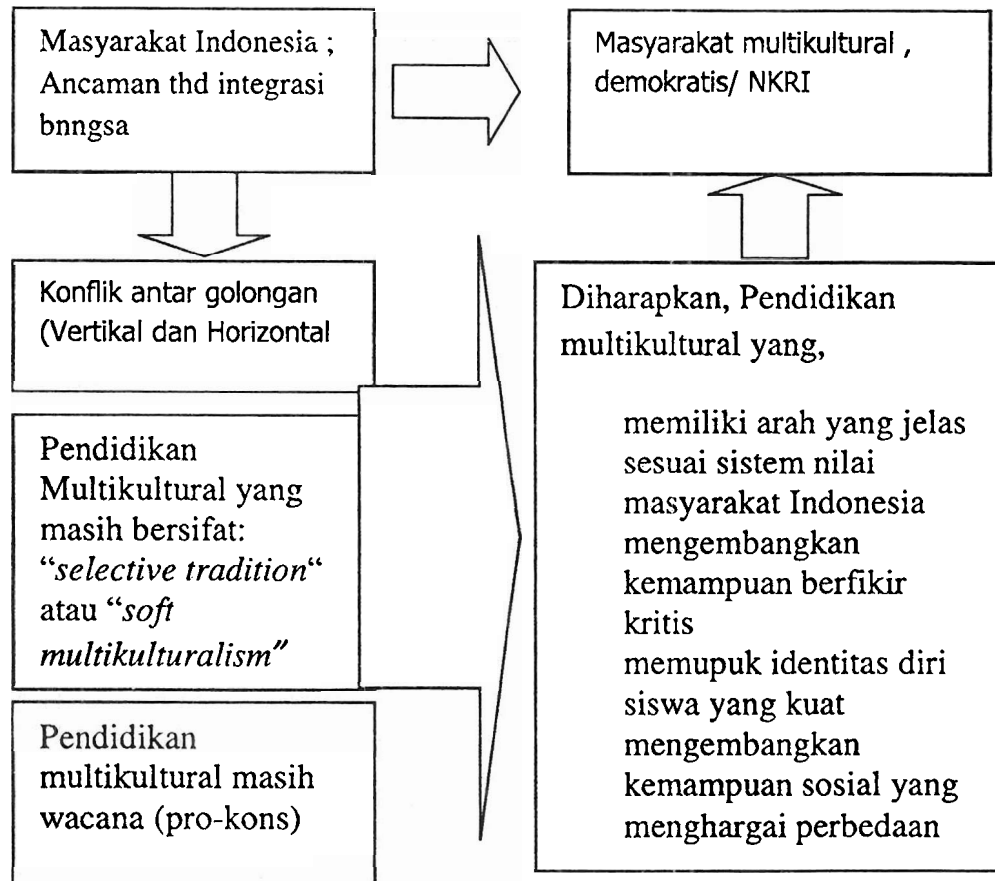
Di samping itu, pendidikan keragaman budaya dalam kurikulum IPS/PKn sekarang bersifat selektif, yakni pengembangan pemahaman budaya dalam pengajaran dipilih dari

budaya yang ada di sekitar siswa., seperti terlihat dalam buku teks PIPS/PKn yang digunakan di sekolah. Menurut Watson (2000: 51-54) pengembangan kesadaran budaya seperti itu tergolong kepada “*soft multikulturalism*” atau kesadaran multikultural yang hanya di permukaan saja. Pendidikan multikultural yang diinginkan adalah berupa pendidikan multikultural yang didasarkan kepada landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis yang jelas sebagaimana yang telah dikembangkan di negara-negara maju yang masyarakatnya beragam.

Bagi masyarakat Indonesia, kenyataan sebagai masyarakat multikultural tidak dipungkiri lagi. Begitu juga harapan ke depan mewujudkan masyarakat multikultural yang saling menghormati dan mampu hidup berdampingan secara damai (masyarakat multikultural yang demokratis) merupakan cita-cita semua orang. Akan tetapi jurang antara kenyataan dan harapan masih sangat luas dengan ditemukannya berbagai persoalan seperti: masih berkobarnya konflik etnik baik horizontal maupun vertikal yang seolah berkepanjangan, belum adanya bentuk kurikulum pendidikan yang secara khusus berbicara tentang hubungan-konflik antar etnik, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang makna multikultural dalam kehidupan masyarakat, atau konsep multikultural baru sebatas wacana di kalangan akademisi.

Menurut sudut pandang pendidikan, kondisi masyarakat Indonesia yang beragam secara etnik masih merupakan potensi yang perlu dikembangkan melalui program pendidikan atau mata pelajaran yang khusus dan terarah kepada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan multikultural di kalangan siswa.

Bila digambarkan permasalahan yang melatar belakangi perlunya pendidikan multikultural, maka akan terlihat seperti diagram berikut



Gambar 1
Peta Permasalahan dan Latar Belakang Pendidikan Multikultural

Merujuk kepada peta permasalahan di atas maka pendidikan multikultural yang perlu dikembangkan di Indonesia minimal memiliki dua misi utama yaitu: 1) sebagai upaya jangka panjang dalam pencegahan konflik etnik di Indonesia, dan 2) mampu mendidik siswa menjadi anggota masyarakat yang punya kesadaran dan kemampuan multikultural yang meliputi: 1) jati diri yang kuat atau integritas moral, yakni teguh pendirian diatas sistem nilai yang benar dan respek terhadap orang lain, 2). Kemampuan dalam interaksi sosial yang bersifat dialogis, kritis, multiperspektif dan berfikiran terbuka, 3) bersikap adil, tidak diskriminatif

Atas dasar permasalahan ini, perlu dikembangkan suatu kajian yang sistematis mengenai fenomena masyarakat serta persoalan-persoalan yang berkembang di balik fenomena itu. Satu hal yang paling menonjol untuk dikaji adalah persoalan

konflik yang terjadi sejak awal reformasi (ketika kran kebebasan dibuka) sehingga setiap kelompok merasa lepas dari ikatan, dan berupaya menjadi yang terdepan. Secara logika konflik dapat muncul karena semakin ekspresifnya masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan emosi, tetapi karena kekurangan dalam kesiapan diri dan pengelolaan sehingga berubah menjadi konflik. Atas dasar ini dilakukan kajian dari fenomena konflik untuk melihat makna di balik konflik sebagai cerminan kondisi sosial emosional masyarakat, yang selanjutnya dijadikan pijakan untuk mengembangkan suatu rekomendasi mengenai pendidikan multikultural.

Tulisan dalam buku ini merupakan pengembangan dari sebuah kajian terdahulu (disertasi tahun 2006) yang menelusuri fenomena konflik yang terjadi antara tahun 1999 sampai dengan 2003 sebagaimana yang dipaparkan pada media massa. Di sini ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu Konflik di Daerah dan Pemberitaan Konflik. Penelitian tersebut menganalisa berbagai pemberitaan media massa mengenai konflik dan menyimpulkan makna sosial dan emosional yang melatar belakangi konflik. Dari makna itu kemudian dikembangkan satu rekomendasi mengenai konsep dasar pendidikan multikultural yang dapat dipakai oleh pendidik dalam praktek pendidikan multikultural.

B. Ringkasan Temuan Analisis Berita Konflik dari Media Massa

Bagian ini dimaksudkan untuk memaparkan ringkasan temuan utama dari penelitian disertasi menjadi landasan pengembangan tulisan mengenai Pendidikan Multikultural Transformatif. Ringkasan temuan ini difokuskan kepada hasil analisis akhir berupa penafsiran terhadap temuan masing-masing berita yang dibanding dengan kajian kepustakaan dan tanggapan para pakar mengenai kasus yang dianalisis.

Berita konflik yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berita konflik Poso, Ambon, dan Sambas yang terjadi antara tahun 1999 sd 2002. Berita-berita tersebut diambil dari media

massa cetak nasional: *Media Indonesia*, *Kompas*, dan *Republika*. Tujuan dari analisis berita mengenai konflik ada dua, yaitu untuk melihat karakteristik konflik, dan ideologi di balik pemberitaan tentang konflik.

Dari hasil analisis berita tersebut ditemukan dua hal yang penting dalam kaitan dengan pendidikan multikultural, yaitu: 1) perbedaan orientasi masing-masing media dalam menyajikan berita konflik, 2) isu-isu etnik dan pemicu konflik yang terungkap dari pemberitaan. Sehubungan dengan orientasi masing-masing media massa, tampak bahwa pemberitaan media massa merupakan fakta yang dikemas sesuai dengan misi setiap media. Konsekwensi dari kenyataan ini adalah pemberitaan yang diambil dari data yang sama akan tampil dengan nuansa yang berbeda. Di sini diperlukan kekritisian pembaca untuk mencerna berita.

Misalnya pemberitaan dari *Republika*, tentang konflik tampak diarahkan kepada politik antar agama. Upaya penggiringan opini pembaca dirangkai dalam bahasa-bahasa yang menyentuh emosi kelompok keagamaan dengan dihadapkan kepada kekuasaan. Artinya pemberitaan *Republika*, mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa terjadi konflik antar agama merupakan tanggungjawab pemerintah yang belum tertunai dengan baik untuk mengelola keragaman agama.

Berita konflik yang disajikan koran *Kompas*, memiliki gambaran yang berbeda. *Kompas* lebih cenderung menyajikan berita konflik dengan menampilkan sikap paternalistik. Dalam pemberitaan konflik, *Kompas* cenderung melihatnya sebagai kerusuhan antar warga yang dipicu oleh para perusuh. *Kompas* berusaha menghindari penyajian berita yang membawa pembaca terpancing ke dalam konflik. Di sini *Kompas* berusaha membungkus fakta dengan sikap pengayom yang berusaha mendinginkan gejolak konflik.

Sedangkan *Media Indonesia*, kadang-kadang menyajikan berita dengan sangat terang menyebut konflik antar kelompok berbeda agama sebagai konflik SARA. Namun pemberitaan *Media Indonesia* lebih mengutamakan perspektif keamanan,

dengan melihat konflik sebagai gejala masyarakat di satu pihak, dan peran kesigapan aparat untuk meredam konflik. Di sini suara *Media Indonesia* lebih akrab dengan suara aparat. Semua pemberitaan dilihat sebagai gangguan keamanan yang harus ditumpas segera (Moeis, 2006: 273-277)

Lebih dalam lagi dari penelitian ini dapat dicermati beberapa temuan yang akan menjadi pijakan bagi pengembangan pendidikan multikultural.

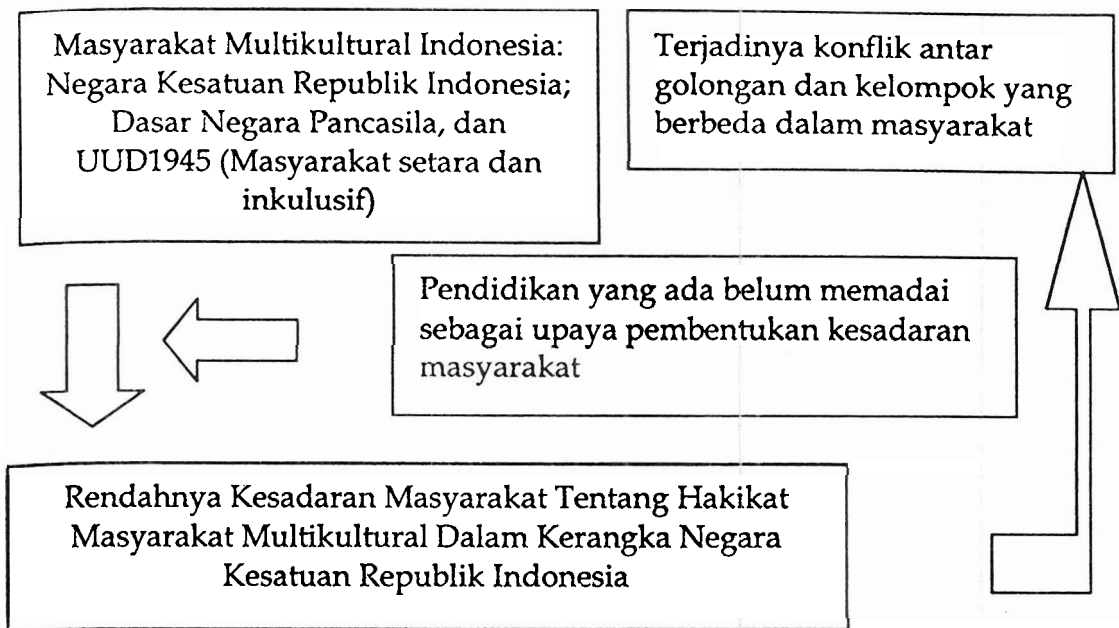
Pertama, dilihat dari cara dan perspektif ketiga media massa tersebut dalam merangkai berita, tampak orientasi yang berbeda dari masing-masing media massa. *Republika* secara eksplisit tampil sebagai media massa yang memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Jika berita yang disajikan tidak terkait secara langsung kepentingan umat Islam, *Republika* tetap tampil sebagai media massa yang bernuansa politik dengan menyoroti peran-peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum. *Kompas* melatarbelakangi pemberitaannya (kasus konflik) dengan perspektif "keamanan" dengan tujuan untuk menjadi penengah antara berbagai kelompok yang bertikai, sekaligus juga sebagai upaya membentuk citra sebagai media yang lebih mengutamakan kepentingan nasional, dengan cara meredam konflik melalui pemberitaan. *Media Indonesia* menampilkan berita konflik dengan perspektif "keamanan", sebagai bagian dari institusi keamanan. Dalam pemberitaan tentang konflik di Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso, *Media Indonesia* lebih terkesan dengan pemberitaan yang mengevaluasi dan melaporkan kinerja aparat keamanan dalam menangani konflik, dan membantah opini-opini yang berkembang dalam masyarakat dengan sumber berita dari aparat keamanan. Dilihat dari penggunaan bahasa dan istilah untuk mendeskripsikan konflik terlihat kesamaan cara pandang ketiga media massa terhadap kelompok yang bertikai. Baik *Republika*, *Kompas* maupun *Media Indonesia* cenderung menggunakan bahasa yang memberi kesan warga yang bertikai adalah emosional, tidak

berprikemanusiaan, sadis, tidak terdidik, dan mudah diprovokasi.

Kedua, berdasarkan berita konflik dari ketiga media massa tersebut, ada beberapa pokok isu konflik yang dominan dalam hubungan antar warga dalam masyarakat plural yakni: 1) konflik antara warga yang berbeda agama, Islam dan Kristen (kasus Ambon, dan Poso); 2) konflik yang bermuatan ideologis, mengarah kepada separatisme (kasus Ambon); 3) pertikaian antar preman dari kelompok yang berbeda agama (kasus Ambon, dan Poso); 4) persaingan politik di tingkat lokal antara kelompok yang berbeda agama (kasus Poso); 5) perluasan konflik antar warga karena aktifitas provokator (kasus Ambon, Sambas dan Sampit , dan Poso); 6) konflik bernuansa budaya terutama antara kelompok pendatang dengan kelompok yang telah lama menempati wilayah (asli) (kasus Ambon awal, serta Sambas dan Sampit

Di samping itu ada keunikan dari konflik yang terjadi di daerah tersebut, sekaligus keunikan ini menjadi cirri pola hubungan-konflik antar etnik di Indonesia.. Keunikan yang pertama, hubungan antar warga bersifat setara. Tidak ada warga mayoritas yang mendominasi minoritas, karena secara politik tidak dibenarkan dalam tataran pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keunikan kedua, konflik antar kelompok terjadi pada satu daerah tertentu, tetapi kelompok yang sama, yang berada didaerah lain justru hidup berdampingan secara harmonis. Atas dasar dua keunikan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara warga yang berbeda identitas sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja, identitas kelompok-kelompok yang ada begitu kuatnya sehingga ketika ada masalah yang membawa nama kelompok maka solidaritas kelompok menjadi menguat untuk membela kelompok. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah kecerdasan social emosional dan sikap rasional anggota masyarakat yang masih rendah untuk hidup dalam keragaman

Untuk lebih jelas tafsiran teoritis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Teoritis Permasalahan

Ketiga, berbeda dengan pemberitaan media massa, kalangan peneliti/akademisi cenderung melihat isu tersebut sebagai klimaks dari persoalan yang lebih dalam dengan latar belakang kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan ekonomi kelompok tertentu, kebijakan pembangunan yang sentralistik, kekecewaan terhadap penegakan hukum, dan keterasingan budaya serta solidaritas kelompok. Sementara kalangan LSM (asing) melihat kasus konflik – terutama yang bernuansa agama – sebagai penindasan HAM oleh kelompok Islam terhadap non Islam. Berbeda dengan kalangan LSM lokal yang melihat kesemua isu utama tersebut sebagai penampakan konflik yang sesungguhnya berakar pada perasaan kekecewaan terhadap hukum, kebijakan ekonomi, persaingan elit lokal, praktek korupsi, dan diperparah dengan kesenjangan ekonomi, serta adanya warisan sejarah kolonial dalam pemisahan penduduk berdasarkan agama (kasus Ambon).

Keempat, berdasarkan tinjauan media massa dan kalangan pengamat bentuk konflik di ketiga daerah yang diteliti – Ambon, Sambas dan Sampit, dan Poso – ada kemiripan di samping perbedaan. Kemiripan terutama terlihat dari awal pemicu

konflik yang berawal dari persoalan sederhana, kemudian meluas menjadi pertikaian kelompok, dan dipertajam oleh aksi provokasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diketahui tetapi mengambil identitas kelompok yang memang sudah bertikai. Aksi provokasi tersebut berupa penyebaran isu, tindakan premanisme yang dilakukan salah satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, hingga sampai ke pembunuhan salah satu warga yang dilakukan (seolah-olah) oleh kelompok yang menjadi lawan. Namun perbedaannya terletak dalam penafsiran fenomena, dimana pada pandangan para peneliti, warga mudah terprovokasi karena sudah lama tersimpan kecurigaan antar kelompok disebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang bertikai; pola keterlibatan warga dalam konflik sebagai wujud solidaritas sosial disebabkan ikatan emosional yang kuat dalam kelompok.

Kelima, dari analisis berita dan tinjauan terhadap pendapat para pengamat disimpulkan perbedaan karakteristik konflik di ketiga tempat ini terletak dalam peran elit yang memanfaatkan identitas yang berbeda antar warga. Misalnya di Ambon, adanya kesenjangan ekonomi antara pendatang dan warga tempatan yang disertai perbedaan identitas berdasarkan agama sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu kelompok yang selama ini mendapat perlakuan istimewa oleh pemerintah. Persaingan ini meningkat menjadi persaingan antara kelompok yang berbeda agama, kemudian diangkat menjadi isu nasional dan internasional oleh pihak yang ingin mengabadikan pemisahan antar warga yang berbeda agama. Dalam kasus Sambas dan Sampit konflik dicirikan dengan pertikaian antara suku Madura (pendatang) dengan suku tempatan (Melayu, Dayak, dan Cina). Selain itu pertikaian dipertajam dengan adanya kebijakan pembangunan nasional yang memarjinalkan penduduk asli. Namun kemudian konflik tersebut juga melibatkan elit lokal yang melakukan "perjuangan" memperkuat identitas kesukuan dari penduduk asli melalui organisasi politik. Terakhir, di Poso provokator (elit kekuasaan) memperpanjang konflik dengan memanfaatkan isu antar agama, guna mencapai

tujuan yang menyangkut persoalan ekonomi dan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang.

Keenam, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial dan primordial, baik didasarkan etnik atau agama sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Ini terbukti dari mudahnya provokator menggerakkan massa untuk melakukan tindak kekerasan melalui isu yang menyentuh kepentingan atau mungkin harga diri kelompok. Sementara di sisi lain, hubungan antar komunitas yang berbeda identitas tidak seintensif hubungan dalam komunitas, terutama untuk kalangan masyarakat di lapisan akar rumput. Selain itu, daya kritis masyarakat untuk memahami suatu peristiwa lebih rendah dibanding keterlibatan emosional dengan kelompok sehingga apabila ada isu negatif lebih cepat diserap dengan sikap defensif ketimbang sikap kritis dan pikiran terbuka. Kondisi ini menjadi karakteristik keragaman masyarakat Indonesia. Karena itu, pendidikan multikultural dibutuhkan adalah pendidikan yang mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Adapun simpulan yang dapat ditarik dari peran media massa sendiri sebagai sumber berita adalah sebagai berikut.

Pertama, media massa lebih cenderung menampilkan berita untuk kepentingan citra perusahaannya (ideologi). *Republika* cenderung dengan warna politik yang berorientasi kepentingan kelompok (Islam), *Kompas* lebih suka memilih menjadi media yang terkesan "netral" seperti layaknya kemauan pemerintah, sedangkan *Media Indonesia* tampak lebih menonjolkan peran aparat keamanan.

Kedua, sejalan dengan ideologi di balik penyusunan berita tentang konflik, masing-masing media massa memiliki sumber rujukan yang mendukung kemauan redaktur. Misalnya *Republika* banyak mengambil rujukan dari tokoh-tokoh Islam, diperkuat juga oleh pejabat resmi, dan aparat keamanan; *Kompas* lebih cenderung dengan rujukan kalangan pejabat dan aparat keamanan; *Media Indonesia* merujuk pendapat kalangan aparat sebagai penyimpul dari rujukan-rujukan lain dari berbagai kalangan. Implikasi dari perbedaan rujukan utama ini tampak

dalam penggunaan bahasa dan cara penyusunan tema pemberitaan.

Ketiga, berdasarkan fenomena peran media massa yang dianalisis di atas tampak bahwa media massa ini masih berpihak kepada kepentingan ideologi sendiri dikatakan bahwa peran media massa belum memadai untuk menjadi sarana publik (*public spheres*) dalam menciptakan masyarakat multikultural yang demokratis. Oleh karena itu, dari sisi pendidikan multikultural, media massa perlu dijadikan sumber belajar yang dikaji secara kritis. Jika tidak dikaji secara kritis, maka masyarakat (siswa) kehilangan manfaat yang berarti dalam pembentukan sikap multikultural yang semestinya dapat diperoleh melalui media massa.

Dari temuan dan analisis tentang konflik dan peran media massa dapat tarik rekomendasi sebagai berikut. Falsafah bangsa Indonesia yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa masih terlalu ideal dan abstrak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jaminan kesetaraan dan kesatuan anggota masyarakat yang beragam sebagaimana dimuat dalam falsafah bangsa tersebut masih perlu direalisasikan lagi secara konkrit. Nilai-nilai dalam falsafah bangsa perlu wadah pengembangan dalam realitas pendidikan, khususnya pendidikan multikultural untuk membantu masyarakat memahami nilai-nilai falsafah bangsa dalam tataran praktis. Selain itu pendidikan ini dimaksudkan juga untuk anggota mendidik masyarakat mampu mengembangkan pemikiran kritis dalam menghadapi semua masalah.

Dengan kata lain diperlukan satu sistem pendidikan multikultural yang dapat menciptakan anggota masyarakat yang memiliki "kecerdasan dan kompetensi multikultural", serta mampu berpartisipasi dalam penciptaan masyarakat multikultural yang demokratis, adil, dan inklusif. Pendidikan ini disebut dengan Pendidikan Multikultural Transformatif. Pendidikan transformatif mengandung pendekatan kritis dimana tahap awalnya adalah eksplorasi kesadaran peserta didik mengenai hal-hal yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dari

kesadaran menuju perubahan diri, dan pada akhirnya perubahan lingkungan.

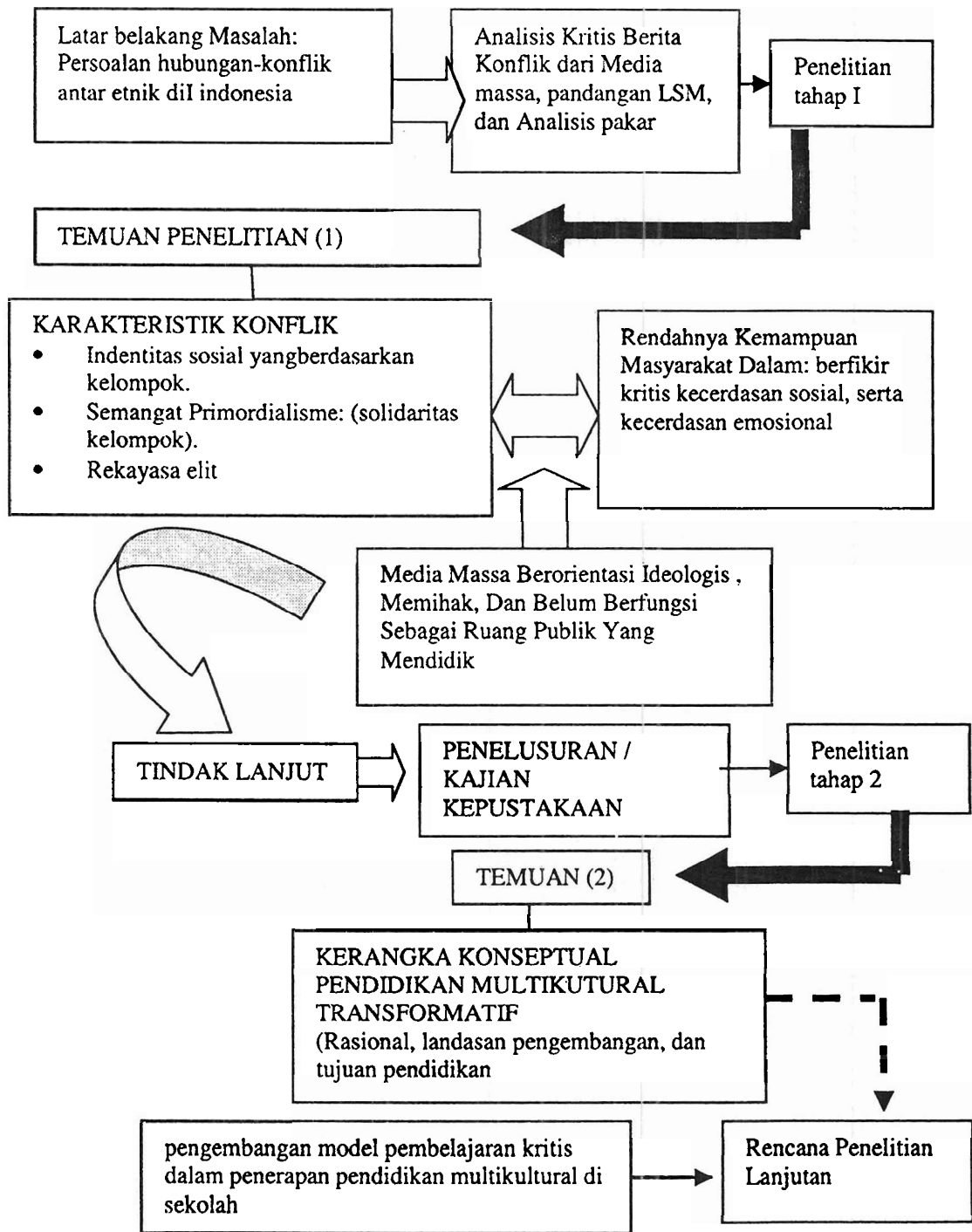
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah: Bagaimana bentuk pendidikan multikultural transformatif yang akan dikembangkan dalam konteks pendidikan multikultural di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan tiga langkah penelitian:

1. Penelitian awal dimulai dengan mengkaji karakteristik atau keunikan masyarakat multikultural di Indonesia. Kajian ini telah dilakukan melalui satu analisis konflik berdasarkan pemberitaan dan pandangan para analis sosial (Moeis, 2006). Hasil analisis ini merupakan pijakan untuk merumuskan kerangka konseptual pendidikan multikultural. Secara ringkas temuan penelitian ini telah dikemukakan di atas sebagai latar belakang penulisan buku ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana.
2. Melakukan kajian kepustakaan untuk mengembangkan satu konsep tentang pendidikan multikultural. Hasil akhir dari kajian ini adalah dikembangkannya satu model konseptual tentang pendidikan multikultural transformatif. Model ini ditawarkan pada bab-bab terakhir dalam buku ini.
3. Mengembangkan satu model Pendidikan Multikultural Transformatif, yang meliputi pengembangan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan melalui satu penelitian pengembangan. Penelitian ini belum terlaksana, tetapi merupakan langkah akhir dari keseluruhan proses penelitian pengembangan.

Selanjutnya tulisan dalam buku ini adalah merupakan penelitian tahap kedua setelah penelitian analisis wacana, sekaligus merupakan penelitian awal bagi penelitian pengembangan,

Secara keseluruhan gambaran alur berfikir penelitian dan kajian dalam buku ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3
Alur Berpikir Penelitian dan Penulisan Buku

C. Metodologi

Karena buku ini merupakan tulisan yang dikembangkan dari sebuah penelitian, berarti ada dua metodologi yang

dimaksud di sini yaitu cara-cara penemuan data dalam penelitian lapangan yang disebut metode penelitian, dan cara pengembangan data menjadi tulisan (penelusuran kepustakaan dan penulisan naskah), yang disebut metode penulisan.

1. Metode Penelitian

Data yang dikembangkan dalam penulisan buku ini, berawal dari penelitian lapangan berupa analisis berita mengenai konflik dari media massa. Dari analisis konflik ditemukan beberapa karakteristik konflik dalam masyarakat majemuk Indonesia. Karakteristik konflik ini menjadi pijakan untuk mengkaji lebih jauh cara-cara pengelolaan dan pencegahan, terutama melalui pendidikan. Dari sini lahirlah rekomendasi mengenai model pengelolaan dan model pendidikan multi-kultural yang relevan untuk dikembangkan. Disini media massa diasumsikan sebagai pengamat atau sumber yang representatif untuk melaporkan peristiwa konflik. Di sisi lain, laporan media massa sering dicurigai membawa pesan-pesan ideology dari pemilik. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kritis (*critical discourse analysis*), dari Fairclough (1995) untuk menyaring informasi yang dilaporkan media massa, kemudian ditafsirkan setelah dibandingkan dengan tafsiran para pakar dan pengamat lain. Hasil temuan dari media massa telah dipaparkan pada bagian kedua bab ini.

2. Metode Penulisan buku

Penulisan bab-bab dalam buku ini disusun secara hirarki. Topik utama adalah Pendidikan Multikultural Transformatif, sekaligus merupakan judul buku. Dari topic ini dikembangkan pokok-pokok pikiran dari Pendidikan Multikultural Transformatif yang meliputi:

- a. Permasalahan dan latar Belakang Perlunya Pendidikan Multikultural
- b. Terminologi dan tujuan pendidikan multikultural
- c. Model Pengelolaan konflik dan identitas menuju masyarakat multikultural

- d. Pendidikan Multikultural Untuk Indonesia
- e. Kerangka konseptual Pendidikan Multikultural
- f. Media massa dan Pendidikan Multikultural
- g. Pentup

Penyajian tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelusuran kepustakaan yang diawali dari penelusuran kepustakaan saat penelitian dilakukan. Kemudian hasil kajian ini dikembangkan lagi dengan penelusuran kepustakaan yang lebih mutakhir sehingga menghasilkan suatu tulisan baru dan rekomendasi kerangka pendidikan multikultural.

D. Daftar Bacaan

- Banks, James (1991) "Multikultural Education: Its Effects on Student's Racial and Gender Attitudes", dalam Shaver, James (ed) *Handbook of Research on Sosial Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Banks, James (1997) *Educating Citizens in A Multikultural Society*. New York: Allyn & Bacon
- Billings, Gloria (2000) "Put Up or Shut Up: The Challenge of Moving from Critical Theory to Critical Pedagogy", dalam Hursh, David & Ross, E Wayne (eds) *Democratic Sosial Education*. New York. Falmer Press
- Bennet, Christine (1995) *Comprehensive Multikultural Education: Theory and Practice. 3rd edition* New York: Allyn and Bacon
- Bloomfield, David cs (2000) "Menganalisis Konflik yang Mengakar", dalam Harris, Peter & Relly, Ben (eds) *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International IDEA
- Fairclough, Norman (1995) *Critical Discourse Analysis*. London & New York: Longman
- Gavaki, Efrosini (1993) Maintenance and Transmission of Ethnic Identity: The Case of The Greeks in Canada. *National*

Europe Center Paper 93. Australian University, Australia . Tersedia online dalam www.anu.edu.au (akses 16 Februari 2005).

- Getis, Arthur, Getis, Yudith & Fellman, Jerome (1985) *Human Geography: Culture and Environment*. New York: Coiler Macmillan Ltd.
- Kymlicka, Will (2002) *Kewargaan Multikultural (edisi terjemahan)*. Jakarta: LP3S
- Moeis, (2006) *Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Transformatif Berdasarkan pola Hubungan-Konflik Antar Etnik*. Disertasi Belum Di Publikasi; Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Parekh, Bhikhu (1997) "National Culture and Multikulturalism", dalam Thompson, Kenneth (ed) *Media and Kultural Regulation*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication
- Partington, Gary & Mc Cuden, Vince (1992) *Ethnicity and Education*. Wentworth Falls, NSW: Sosial Sciences.
- Summers, Laura L. *Kulturally Responsive Leadership In School Libraries*. *Library Media Connection*. March/April 2010. Dapat diakses pada www.epnet.com
- Tilaar. H.A.R (2004) *Multikulturalisme: Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo
- Watson, C.W (2000) *Concepts in Sosial Sciences: Multiculturalism*. Philadelphia: Open University Press.
- Wiriaatmadja, Rochiati (1992) *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional*. Disertasi. Program Pascasarjana IKIP Bandung

Yeom, MinHo; Acedo, Clament & Utomo, Ery (2002) The Reform of Secondary Education in Indonesia During 1990s: Basic Education Expansion and Quality Improvement Through Curriculum Dcentralization. *Asia Pacific Education Review*, Vol 3 No 1. h. 36-68.

BAB II

TERMINOLOGI DAN TUJUAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dalam fenomena kehidupan bermasyarakat dengan beragam budaya dewasa ini banyak peristiwa sering dikaitkan atau mengatasnamakan multikultural. Kenyataan ini menjadikan pemahaman tentang konsep multikultural menjadi beragam. Oleh karena itu, sesuai dengan perspektif tulisan ini sebagai pemikiran kritis, maka pembahasan bab ini akan difokuskan kepada penjelasan konsep multikultural dan pendidikan multikultural dari sudut pandangan kritis. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempertegas implikasi pemikiran kritis dalam konteks pembelajaran atau pendidikan multikultural. Kejelasan penggunaan terminologi dengan perspektif pemikiran yang melandasinya akan memberi implikasi tersendiri dalam pendidikan atau pembelajaran.

Sedemikian banyaknya istilah yang ingin dikaitkan dengan multikultural, para ahli teori socialpun belum ada kesepakatan tentang apa makna teori multikultural. Bahkan timbul pertanyaan apakah memang ada teori multikultural dalam arti teori yang cenderung ke dunia praktis tempat segala sesuatu di dalamnya multikultural. Perdebatan ini diungkap oleh pakar teori social seperti George Ritzer dan Barry Smart (2001). Argumen yang lebih luas tentang multikultural telah mencetuskan dua jenis prinsip universal. Pertama mengenai universalitas hak-hak, yang kedua adalah prinsip-prinsip keadilan social. Kedua prinsip tidak terpisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang memiliki argument yang sama kuatnya baik dalam tatanan etika masyarakat atau dalam kebijakan; bagaimana juga diyakini oleh para ahli teori social bahwa kebijakan yang baik akan memberikan keadilan yang baik pula. Namun kedua prinsip ini tidak sejalan dalam hal penekanan.

Kelompok yang menekankan *hak* menganggap individu dalam politik dan ekonomi adalah kekuatan di belakang apapun yang yang baik dalam satu masyarakat yang juga baik. Di Amerika kelompok ini dianggap sebagai "*konservativ*" dan di Eropa sebagai kelompok "*liberal*". Sebaliknya kelompok yang menekankan *keadilan* meyakini bahwa bila ketika individu diberikan peluang mengejar hak-hak mereka maka akan terjadi kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Kemudian akan terjadi kelompok yang kuat akan merampas kelompok yang lemah. Bagi mereka pendukung keadilan menginginkan negara yang kuat sebagai penjamin hasil-hasil social yang yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Kelompok ini dianggap sebagai kelompok sosialis atau kelompok kiri.

Sementara kelompok *konservativ* atau *liberal* (pendukung *hak*) biasanya berpikir tentang kebebasan, dan kelompok keadilan cenderung berfikir tentang Kesetaraan sebagai sebagai nilai yang relevan. Masing-masing punya argument yang saling berlawanan satu sama lain, bahkan menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Di sinilah letaknya ketidak sepakatan para ahli tentang teori masyarakat multikultural. Perdebatan lain yang paling menonjol juga sebagai bukti ketidak sepakatan para ahli tentang hakikat teori ini, adalah mengenai "*identitas-identitas*". Dalam masyarakat multikultural, dikatakan bahwa orang cenderung diidentifikasi dengan kelompok etnis, ras, agama, jender, dan atribut-atribut social lainnya. Politik identitas politik yang menguji prinsip, nilai dan kebijakan. Dalam tataran realita multikultural, identitas justru menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi para imigran karena eksklusif atau tidak diakui.

Gambaran di atas memperlihatkan betapa istilah multikultural belum mendapat kesepakatan, karena begitu banyaknya kepentingan di balik penggunaannya. Namun barangkali kajian multikultural lebih relevan adalah kajian tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan nilai-nilai yang mengatur kebijakan-kebijakan social dalam sebuah masyarakat yang baik. Dalam hal ini pendidikan multikultural adalah pendidikan nilai-nilai bagaimana seseorang hidup dalam masyarakat dengan

saling menghormati, toleransi, jauh dari penindasan satu sama lain

A. Multikultural

Watson (2000:110) menyatakan dalam bukunya *Multiculturalism* bahwa , “ ... *multiculturalism, as a principle to be acted upon, requires from us all a receptivity to difference, an openness to change, a passion for equality, and ability to recognize our familiar selves in the strangeness of others.*” (multikulturalisme adalah suatu prinsip untuk bertindak, yang menghendaki kita semua untuk bersifat menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, perhatian terhadap kesetaraan, dan mampu mengenali diri sendiri dalam kaitan dengan perbedaan pada diri orang lain).

Dengan imbuhan “isme” menjadikan multikultural adalah paham atau ideologi yang ada dalam diri setiap orang. Dilihat dari pengertian di atas di dalamnya ada tiga unsur: 1 kemampuan bertindak (pengetahuan, sikap dan perilaku), 2. Landasan untuk bertindak itu adalah “kehendak” atau “kesadaran” untuk menerima perbedaan, keterbukaan pikiran, dan orientasi anti diskriminasi; dan 3. Adalah kemampuan mengenali diri, artinya setiap pribadi harus memiliki jati diri atau integritas moral dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda; di sini yang dimaksud adalah perpaduan antara kesadaran diri berkenaan dengan karakter, dan kemampuan menyadari keberadaan orang lain.

Sebagai sebuah prinsip multikulturalisme bukan sebuah dogma yang statis, tetapi adalah proses yang dinamis. Memaknai diri dan orang lain dalam konteks yang terus berubah adalah proses yang membuat setiap orang terus belajar dari pengalaman kebersamaan untuk terus memperbaiki diri dalam hal memperlakukan orang lain yang didasari oleh nilai-nilai keadilan sosial. Sebaliknya perubahan dalam pandangan dan cara-cara memperlakukan perbedaan bukan berarti, setiap pribadi kehilangan pemaknaan terhadap diri sendiri. Setiap individu justru harus mengenali dan memiliki identitas pribadi yang kuat

dengan sistem nilai yang jelas, namun tidak untuk merendahkan orang lain.

Dalam ilmu psikologi neuro (*neuroscience*) karakteristik kepribadian yang dewasa dalam kehidupan sosial ada dua yaitu keasadaan sosial (*sosial awareness*) dan kompetensi sosial (*sosial facility*). Keasadaran sosial yang ditandai dengan pertama, *primal empathy* (perasaan terhadap keberadaan orang lain, pemahaman terhadap sinyal-sinyal emosional non verbal). Keasadaran terhadap orang lain dalam kondisi empati primer ini masih sangat sekilas dan sewaktu-waktu ketika menyadari adanya perubahan sinyal emosional pada diri orang lain. Hasil dari empati primer sebatas memberikan kesan terhadap orang misal ini orang sedang marah, ini orang sangat percaya diri dst.

Kedua, *attunement* (mendengar dengan penuh perhatian). Dalam hal ini seseorang lebih dari menangkap kesan tetapi mendedengar dengan penuh perhatian terhadap pembicaraan orang lain. Disini tidak ada respon terhadap orang lain kecuali menjadi pendengar yang baik dan memahami alur pembicaraan, dan memahami kebutuhan orang lain.

Ketiga, *empathic accuracy* atau empati lanjut (memahami pemikiran, perasaan, dan kebutuhan orang lain), merupakan keahlian penting dalam kecerdasan sosial. Kelebihan ini dari empati primer terletak pada pemahaman yang nyata mengenai perasaan dan pikiran orang lain. Dalam berbagai penelitian empati lanjut merupakan kunci kesuksesan dalam hubungan inter personal seperti dalam keluarga.

Keempat *sosial cognition* (mengetahui bagaimana cara kerja dunia sosial), merupakan aspek keempat dalam kesadaran interpersonal. Kemampuan ini berupa pengetahuan tentang bagaimana mesti bersikap atau bertindak dalam situasi sosial. Orang yang memiliki kemampuan ini mengerti apa yang diharapkan lingkungan terhadap dirinya.

Kompetensi sosial (*social facility*) dimensi kedua dalam kecerdasan sosial, adalah kemampuan sosial yang ditandai dengan pertama, *synchrony* (berinteraksi secara lancar pada tingkat non-verbal), pada tahap ini awal dari interaksi dengan

orang lain yang ditandai dengan perasaan senang, menagilir dan mudah. Kekurangan dan sinkroni akan menjadikan reaksi emosi yang tidak stabil seperti malu, ragu-ragu untuk memulai pembicaraan. Kedua, *self-presentation*: menghadirkan diri sendiri secara efektif, yakni menghadirkan pemikiran, pembicaraan dengan cara mengesankan dan penuh karisma. Ketiga *influence* menciptakan hasil sebuah interaksi sosial yang member pengaruh kepada orang lain. Keempat *concern* adalah kemampuan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, dan mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan itu) (Goleman, 2006: p 84)).

Namun kedewasaan kultural yang dimaksud lebih dari sekedar atribut psikologis sebagaimana dipaparkan di atas. Dalam kedewasaan kultural yang sesungguhnya ada kesadaran diri (*self-awareness*) tentang nilai-nilai yang dianut dan menjadi karakter serta pilihan hidup yang pasti. Kesadaran nilai membentuk kepribadian yang utuh dalam hubungan vertical terhadap Pencipta sebagai sumber nilai. Dengan hubungan vertical yang baik terbentuk kekuatan pribadi yang saleh dan taqwa. Kesalehan dan ketaqwaan terwujud dalam sikap pribadi sebagai hamba Pencipta, dan dalam hubungan dengan sesama makhluk ciptaan. Perlakuan yang baik terhadap orang lain bagian dari karakter yang dimiliki seseorang yang punya kedewasaan kultural. Dalam konteks multikultural, dibutuhkan adalah kedewasaan pribadi dan kedewasaan dalam berdam-pingan dan berinteraksi dengan orang lain yang berbeda identitas.

Prinsip dalam multikulturalisme tidak menghendaki lahirnya penggabungan paham yang menafikan perbedaan itu sendiri dengan memfokuskan perhatian pada titik-titik kesamaan belaka. Prinsip mencari semata-mata titik kesamaan saja, dan menganggap bahwa dalam keragaman terjadi saling melengkapi kekurangan masing-masing, atau melahirkan satu pemikiran baru yang menjadi penengah, justru bertentangan dengan pemikiran multikulturalisme.

Istilah lain juga sering dipakai dalam hubungan dengan kajian tentang keragaman budaya, adalah pluralisme. Kata plural dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Anis Mata (2005:11) menulis makna plural yang dirujuk dari kamus bahasa Inggris, terbagi tiga:

Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan.

Kedua, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu.

Ketiga, pengertian sosio-politis adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang menjadi karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Pada pengertian terakhir di atas tampak seolah-olah pengertian pluralisme dengan multikulturalisme tidak berbeda. Namun dalam perkembangan penggunaan istilah pluralisme yang dikaitkan dengan agama (pluralisme agama) telah menimbulkan makna yang jauh menyimpang dari makna hakiki keragaman. Sebagaimana diungkap oleh Anis Mata (2005:14):

..." bila dikaji lebih mendalam , pada hakikatnya ketiga pendekatan itu tidak saling bertentangan, melainkan saling menyempurnakan, khususnya jika menginginkan agar "pluralisme agama" didefinisikan sesuai kenyataan objektif di lapangan. Apalagi dewasa ini di kalangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu ada kecenderungan baru yang cukup kuat untuk memperluas definisi agama hingga mencakup semua jenis kepercayaan dan keyakinan serta ideologi, baik yang berketuhanan (*theistic*) maupun yang tidak berketuhanan (*non-theistic*) sebagaimana dalam klasifikasi John Hick, atau jenis agama alternative yang menurut terminologi Paul Tillich adalah ideologi yang mirip agama atau ideologi pengganti agama...."

Lebih lanjut Anis Mata menyimpulkan bahwa dari pengertian “agama” yang begitu luas, kemudian dirangkai dengan kata “pluralisme” maka menjadi “pluralisme agama”. Jika diartikan “pluralisme agama” akan bermakna sebagai kondisi hidup bersama (*ko eksistensi*) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan cirri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Namun dari segi konteks “pluralisme agama” sering digunakan dalam studi dan wacana ilmiah, istilah ini memiliki arti bahwa semua agama adalah menifestasi dari realitas yang satu. Sehingga semua agama sama, tidak ada yang lebih baik dari yang lain.

Dari uraian di atas tampak bahwa makna pluralisme semakin jauh dari gagasan keragaman. Adian Husaini (2005: xiii) menegaskan bahwa pluralisme adalah agama baru, yang tidak membenarkan pemeluk agama lain untuk menjadi dirinya sendiri, atau mengekspresikan jati dirinya secara utuh, seperti menggunakan simbol-simbol tradisional. Wacana pluralisme tidak lain adalah upaya penyeragaman (*uniformity*). Atas dasar inilah hakikat pluralisme dikatakan tidak sesuai dengan makna multikulturalisme.

Secara historis-filosofis, “pluralisme” merupakan reaksi kaum liberalis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen di Eropas abad ke 18. Keadaan masyarakat yang kacau dengan banyaknya sekte, atau kelompok keagamaan, dan sebagian dari mereka menerima perlakuan yang diskriminatif (Anis Mata, 2005:17). Kemudian dengan gagasan “pluralisme agama” pada hakikatnya merupakan upaya liberalisasi agama (Kristen) untuk lebih toleran dengan agama lain. Gagasan pluralisme adalah cara pandang baru dalam menghadapi keragaman beragama yang lahir sebagai proses liberalisasi agama. Lebih jauh Anis Mata mengkritik bahwa gagasan pluralisme agama bertentangan dengan hak azasi manusia, karena mereka menerapkan keragaman dalam agama hanya sebagai praktek private, dalam praktek publik tidak ada keragaman, yang ada hanya satu keyakinan bersama yang disebut pluralisme agama.

Karena begitu jauhnya pengembangan makna pluralisme digunakan dalam menghadapi dinamika keragaman, maka arti pluralisme dipastikan jauh berbeda dengan arti multikulturalisme (khususnya sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini). Dengan makna pluralisme cenderung melihat titik-titik kesamaan yang menempatkan semua kelompok dalam tataran yang setara. Bila konteks setara diaplikasi ke dalam pemikiran structural politik atau negara yakni dalam cara-cara negara memperlakukan warga yang berbeda kemungkinan masih relevan, karena memang semestinya negara memberi peluang yang setara untuk setiap kelompok berjalan dengan karakteristiknya, dan mengatur agar satu kelompok tidak menindas kelompok lain yang merupakan tugas negara. Tetapi, jika konsep itu diterapkan menjadi prinsip individu dalam hubungan sosial kemasyarakatan akan menjadi kontra produktif. Tidaklah logis untuk mengajarkan setiap orang melihat semua agama, budaya, adat sama baiknya, dan bahkan tujuannya juga sama. Dalam hal ini, makna pluralisme menjadi bertentangan dengan kodrat manusia yang memang dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda.

Hakikat multikultural sebagaimana dikemukakan dalam awal tulisan ini, tidak mengarahkan orang melihat kepada persamaan atau kebaikan masing-masing untuk diakui satu sama lain, tetapi yang diperlukan adalah "kedewasaan" untuk melihat dan mengenali diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda. Di sini dipakai istilah "kedewasaan" karena ada tuntutan pada setiap individu untuk berpegang pada prinsip yaitu ketegasan jati diri, dengan kesadaran dan kemampuan diri (*awareness and competence*) untuk tidak merendahkan atau mendiskriminasi orang lain.

Dalam konteks hubungan orang dewasa, dialog dan saling mendengar (*reciprocal*) dalam penyelesaian masalah adalah sangat penting. Berarti dengan cara pandang multikultural eksistensi perbedaan, identitas, dan keteguhan pada prinsip tetap diakui. Namun, dalam hubungan antarbudaya atau interaksi sosial setiap orang punya kesadaran dan kemampuan

untuk memperlakukan orang yang berbeda dengan tanpa diskriminasi. Inilah yang dimaksud dengan “kedewasaan” yang mengandung dua hal yaitu kesadaran atau kesadaran dan kemampuan multikultural (*awareness and competence*)

Sudah tentu dengan pandangan demikian, pluralisme tidak sama dengan multikulturalisme. Dalam multikulturalisme perbedaan dan karakteristik tiap kelompok dapat muncul ke ruang publik. Watson (2000:110) menegaskan dalam multikulturalisme terdapat beberapa dimensi seperti “*identity*” yang berarti di dalamnya ada “*self-respect*”. Di sisi lain ada rasa memiliki terhadap suatu komunitas, agama, bangsa. Selain itu ada juga perasaan lokalitas seperti komitmen terhadap adat, bahasa, wilayah, dan ada juga rasa senasib dalam sejarah yang terwujud dalam keluarga dan persaudaraan. Semua itu adalah perbedaan dan keragaman yang tampak dalam kehidupan, maka multikulturalisme adalah prinsip yang dianut setiap orang untuk mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman itu.

Gagasan yang terkait dengan “kedewasaan multikultural” adalah toleransi. Istilah ini secara gamblang sering diucapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk berdampingan dengan orang yang berbeda. Namun bila dikaji secara mendalam, penerapan toleransi tidak mudah. Setiap kelompok memiliki penafsiran sendiri mengenai toleransi. Oleh karena itu perlu melacak kembali alur peradaban masa lampau yang memberi contoh konkrit tentang toleransi.

Dalam pandangan para ahli seperti Jurgen Habermas dan Derrida sebagaimana diungkapkannya dalam buku Giovanna Borradori (2005) yang berjudul *Philosophy in a Time of Terror*, melihat toleransi sebagai warisan keagamaan masa lalu. Bagi mereka toleransi dilihat sebagai sikap dari penguasa kepada yang dinaungi. Dalam hal ini kelompok yang berkuasa memberi ruang kepada kelompok yang berbeda untuk melakukan aktifitas sesuai dengan karakteristik mereka.

Gagasan yang dapat disimpulkan dari pandangan kedua pemikir kritis ini adalah bahwa toleransi pertama-tama berbentuk kemurahan hati, namun di dalamnya ada syarat atau

batas tertentu ketika toleransi tidak berlaku. Bagi keduanya *toleransi* mengandung makna ketidak-setaraan antara orang yang memberi toleransi dengan pihak yang diberi toleransi, sekaligus di dalamnya ada unsur kekuasaan. Tampaknya dalam pandangan mereka, toleransi bukan hal yang pas untuk masyarakat multikultural, karena mereka lebih melihat pada unsur kesetaraan dan resiprokal (timbang balik yang setara). Dalam kenyataannya saat ini tidak ada satu negara atau bangsa pun di dunia yang benar-benar menerapkan kesetaraan dan resiprokal, meskipun mereka mengatakan sebagai masyarakat yang paling demokratis. Satu keniscayaan, selalu saja ada kelompok mayoritas dan minoritas dalam realitas masyarakat.

Dalam pandangan John Locke seorang pemikir liberal pada abad 17, hakikat toleransi terdapat dalam penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Dalam konteks bernegara, hak ini dilindungi oleh negara dengan payung hukum yang adil, dan dalam konteks hubungan sosial, perlu adanya saling menghormati dan pengakuan yang dilembagakan dalam aturan yang jelas. Di sini Locke melihat perlunya toleransi dan payung hukum.

Tidak jauh berbeda pemikir lain John Rawls ahli politik abad 20 mengungkapkan bahwa konsep multikultural baginya ada dalam keadilan yang disepakati sebagai *consensus (overlapping consensus)*. Dalam *consensus*, keadilan menjadi titik temu dan sentral untuk menengahi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Demikian juga filsuf lain, J.J Rousseau, melihat unsur dasar dari tatanan sosial dalam masyarakat multikultural adalah kebebasan individu. Untuk menjamin adanya kebersamaan maka diperlukan kesadaran setiap orang untuk saling menghormati dan "pengorbanan" hak individu atas kehendak sendiri demi kebersamaan (dalam Moeis 2009: 6). Tampaknya dalam pandangan para filsuf tersebut tidak disebut secara eksplisit kata toleransi, namun implicit dalam "kesadaran" setiap individu untuk mengutamakan kebersamaan meskipun di situ ada persyaratan yang diperlukan seperti keadilan, saling menghormati dan "pengorbanan" hak individu. Dengan kata

lain toleransi dapat terjadi jika ada jaminan keadilan untuk semua pihak yang berbeda.

Dari pandangan para pemikir barat di atas, belum tampak wujud nyata toleransi dalam kehidupan, dan nilai-nilai yang dianut sebagai bagian dari kompetensi pribadi yang multikultural secara konkrit. Dalam sejarah masyarakat Islam di masa lalu ada hal bermakna yang dapat dipelajari mengenai ini.

Dalam sejarah pemerintahan Islam pertama di Madinah, tercatat peristiwa besar yang menunjukkan bahwa hubungan kelompok mayoritas dan minoritas dalam ikatan yang sangat baik dan tertata rapi. Dalam artikel M. Abdulsalam (2006) yang dipublikasi melalui IslamReligion.com berjudul *The Tolerance of the Prophet towards Other Religion*, diungkapkan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, di daratan Arab terdapat berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, Zoroasteri, Politheis, dan lain-lain kepercayaan yang berdiri sendiri.

Untuk melihat contoh nyata dari toleransi, adalah tepat ketika Islam masuk dalam tataran politik berupa negara seperti halnya di Madinah, dengan hukum khusus yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw yang bertindak sebagai kepala pemerintahan. Saat beliau memulai pemerintahan Islam di Madinah, hal pertama yang menjadi perhatian beliau adalah menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat yang sebelumnya hidup dalam peperangan antar suku yang tidak pernah berhenti. Untuk ini Nabi Muhammad Saw, menyusun satu "konstitusi" yang dikenal dengan "Piagam Madinah".

Dalam konstitusi ini dimuat secara detail tanggungjawab semua kelompok yang tinggal di Madinah, serta kewajiban terhadap satu sama lain, dan batasan khusus antara satu dengan lain. Pasal pertama dalam konstitusi adalah "*One Nation*". Semua kelompok yang disebut dalam konstitusi adalah masyarakat Madinah tanpa pengecualian berdasarkan agama, ras, dan keturunan. Semua kelompok dilindungi dari penyerangan oleh kelompok lain. Semua suku bertindak sebagai satu kesatuan, bila terjadi penyerangan terhadap satu kelompok atau agama mereka, dipandang sebagai serangan terhadap negara dan umat

Islam juga. Satu hal yang penting dalam piagam adalah bila terjadi pertikaian yang menimbulkan masalah, maka dikembalikan kepada Allah dan RasulNya.

Dalam naungan Konstitusi Madinah, juga diberikan *Freedom of Religious Assembly and Religious Autonomy*, dan *Politics*. Kelompok Yahudi di bawah pemerintah Madinah memiliki kebebasan untuk melaksanakan ibadah mereka dan juga memiliki sekolah sendiri yang bernama *Bait-al Madras*, yang mengajarkan taurat dan peribadatan untuk kalangan mereka. Demikian juga kebebasan yang diberikan kepada pemeluk agama lain seperti Kristen sebagaimana diungkap oleh Abdulsalam (2006):

"The first article of the constitution was that all inhabitants of Medina, the Muslims as well those who had entered the pact from the Jews, Christian, and idolaters, were "one nation to the exclusion of all others". All were considered members and citizens of Medina society regardless religion, race,, or ancestry. People of other faith were protected from harm as much as the Muslims, as is stated in another article, "To the Jews who follow us belong help and equity. He shall not be harmed nor his enemies be aided".

(ayat pertama dalam naskah konstitusi adalah bahwa setiap penduduk MAdinah, Muslim dan yang lain seperti Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, adalah satu bangsa . Semua adalah warga masyarakat Madinah tanpa pengecualian deri segi agama, ras, keturunan. Semua orang dari agama lain dilindungi dari peyerangan sebagaimana orang Islam, seperti yang disebutkan dalam ayat lain pada naskah konstitusi" kepada semua orang yahudi yang tidak menentang kami berhak mendapatkan bantuan dan kesetaraan. Dia tidak boleh disakiti dan juga musuhnya tidak boleh ditolong).

Sebelumnya antar suku di Madinah memiliki sekutu dan musuh dalam kota dan di luar kota Madinah. Pemerintah Nabi Muhammad Saw menyatukan suku-suku yang berbeda ini dalam satu sistem pemerintahan yang masih mempertahankan persekutuan antar suku tersebut. Semua suku bertindak sebagai satu kesatuan. Satu serangan terhadap suku atau agama

dipandang sebagai serangan terhadap negara dan umat Islam juga. Hal ini disebabkan pemegang kekuasaan adalah Muslim maka Nabi Muhammad Saw sangat keras sekalai mengingatkan agar tidak terjadi salah perlakuan terhadap orang lain yang berbeda.

Dalam berbagai surat yang dikirim oleh utusan Nabi Saw kepada pimpinan non muslim yang meminta perlindungan kepada pemerintah Nabi Muhammad Saw sebagaimana terlihat pada surat beliau berikut ini:

"This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity, near and far, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them, because Christians are my citizens; and by God! I hold out against anything that displeases them. No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries. No one is to destroy a house of their religion, to damage it, or to carry anything from it to the Muslims' houses. Should anyone take any of these, he would spoil God's covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate. No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female Christian is married to a Muslim, it is not to take place without her approval. She is not to be prevented from visiting her church to pray. Their churches are declared to be protected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world)." [1]

Surat ini mengandung beberapa point penting yang melindungi hak azasi manusia seperti: perlindungan kelompok minoritas di bawah undang Islam, kebebasan beribadah dan bergerak, kebebasan untuk memiliki pengadilan sendiri, bebas dari wajib militer, dan perlindungan dalam perang .

Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad Saw menerima delegasi 60 orang Kristen yang berkunjung ke masjid Nabi di Madinah, Ketika waktu shalat tiba mereka menghadap kiblat

kearah timur, Nabi Saw memerintahkan untuk membiarkan mereka dan tidak menyakiti mereka.

Singkatnya dalam pemerintahan Islam Madinah, semua kelompok berjalan dengan karakteristik mereka di bawah satu negara-bangsa (*nation*) Madinah. Piagam Madinah menggariskan semua aspek kehidupan yang menyangkut hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok minoritas di bawah Undang-Undang Islam, kebebasan beribadah dan berkelompok, kebebasan untuk memiliki pengadilan sendiri dan perlindungan hak milik mereka, dan pengecualian dari kewajiban militer, dan hak untuk dilindungi dalam perang. Demikian juga dalam bidang politik Nabi Muhammad Saw pernah mengirim seorang utusan non-Muslim yang bernama Amr- Ibn Umayyah ad-Damry ke Negus Raja Etiopia.

Islam mengakui realitas bahwa banyak keyakinan di atas bumi, dan memberi hak terhadap individu untuk memilih jalan yang diyakininya benar. Agama tidak untuk dipaksakan kepada seseorang di luar kesadarannya. Aturan ini ada dalam AlQuran, dan contoh nyata telah diperlihatkan dalam sejarah pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Jika Al Quran dibaca dalam kerangka moralitas dan melalui bukti sejarah akan terlihat sejumlah bukti toleransi yang tinggi dalam ajaran Islam.

Dari paparan sejarah itu ada banyak hal yang dipelajari tentang masyarakat dan pribadi yang memiliki sikap multikultural. Yang pasti dalam tataran yang sistematis tentu ada landasan yang kuat sehingga setiap individu bertindak dalam kematangan sosial yang sempurna.

Landasan pertama yang menjadi patokan prinsip multikultural adalah konsep "*one nation for all*". Dalam konsep satu bangsa tersirat konsep "kebersamaan". Kebersamaan itu tidak lepas begitu saja tetapi diikat dalam satu keputusan politik yang inklusif sebagai tercermin dalam Piagam Madinah. Piagam ini merupakan landasan konstitusional yang menegaskan hubungan timbal balik antara kelompok-kelompok yang berbeda disertai hak dan kewajiban masing-masing kelompok dalam fungsi kewarganegaraan sebuah komunitas (Emeric 2002:131).

Dengan piagam tersebut, gagasan satu bangsa memiliki asas hukum yang jelas sebagai jaminan hak setiap warga negara. Oleh karena itu dalam masyarakat multikultural, hal pertama yang perlu dimiliki adalah perlindungan hukum dan kesadaran bersama terhadap adanya satu negara bangsa. Namun landasan fundamental dari semua itu adalah hubungan vertikal antara individu dan masyarakat dengan Pencipta yang disebut dengan "*tawhid*", berupa keyakinan kepada Ke Esaan Allah pemegang segala kekuasaan (AL Malik). Sebagaimana tertera dalam dokumen "*Piagam Madinah*" yang menyatakan bahwa segala perbedaan pendapat dikembalikan kepada Allah swt dan RasulNya.. Prinsip ini ditegaskan dalam Al Quran seperti yang tertera antara lain dalam surat ke 4 Annisa ayat 59 (Moeis, 2009:8).

Landasan vertikal (*tawhid*) menjadi rujukan dalam membangun hubungan horizontal sesama manusia. Satu negara bangsa yang terdiri di dalamnya dari anggota masyarakat Muslim yang mayoritas dan pemegang tampuk kekuasaan sangat diperingatkan agar berlaku adil, kepada semua golongan. Perlakuan ini wujud dalam hubungan masyarakat dengan prinsip kesetaraan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam satu hadis (Zakaria, edisi terjemahan 2007:215) bahwa ada tiga hal yang tidak boleh dibedakan baik terhadap Muslim atau non-Muslim: 1. Berlaku baik kepada Ibu Bapak apakah dia non Muslim atau Muslim; 2. Janji harus ditepati baik kepada non-Muslim atau Muslim; 3. Amanah harus ditunaikan, apakah yang menyimpan amanah itu Muslim atau bukan.. Demikian juga dalam hal bertetangga, baik Muslim maupun non Muslim berhak mendapat perlakuan baik, adil, dan tanpa diskriminasi dari seseorang. Dalam konteks kebersamaan semua golongan satu sama lain hidup berdampingan dalam toleransi yang tinggi, serta jaminan yang setara dan sama di depan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing golongan, tidak ada perbedaan status dan posisi. Prinsip kesetaraan dan keadilan ini didasarkan pada standar moralitas *tawhid* (Moeis,2009:9).

Moralitas yang bersandar kepada *tawhid* menjadi kekuatan karakter individu setiap muslim sebagaimana di contohkan oleh Nabi Saw dan juga para sahabat beliau. Seseorang yang berkarakter dengan berlandaskan *tawhid* akan bersikap sebagai *rahmatat lil alamiin* yakni pembawa rahmat, kesejukan, keamanan bagi orang lain. Karena itu, pantas dikatakan bahwa karakter seperti ini adalah satu dari kompetensi multikultural yang merupakan jati diri seorang anggota masyarakat yang mencintai Allah dan RasulNya,

Selain toleransi, nilai multikultural keadilan juga yang menjadi prinsip dasar hidup bermasyarakat yang terealisasi secara sempurna dalam pemerintahan Nabi Saw, Dalam penerapan prinsip keadilan (*justice*), Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap kerabat sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Al Quran surat ke 4:135 yang maknanya menyeru orang beriman untuk memberi kesaksian dengan benar meskipun untuk diri sendiri, kerabat, miskin atau kaya; jika menyelewengkan keadilan Allah menyaksikan semua itu. Dalam hal ini, tegaknya keadilan untuk semua juga berlandaskan kepada moralitas *tawhid*, yakni dengan meyakini jika keadilan di langgar, maka Allah sendiri yang akan menegakkannya, dengan makna pembuat ketidakadilan akan menerima akibat dari prilakunya.

Selain itu dalam prinsip moralitas *tawhid*, setiap orang wajib memperlakukan orang lain sebagai saudara (*Ukhwah*), karena perintah agama mengatakan semua makhluk adalah keluarga Allah Swt (mafhum hadits). Logikanya siapa yang berlaku baik kepada keluarga Allah akan mendapat kebaikan, sebaliknya berlaku buruk tentu akan mendapat balasan buruk; bahkan berlaku kepada binatangpun akan mendapat pembalasan yang buruk apalagi kepada manusia makhluk yang mulia.

Dorongan *tawhid* juga menjadikan setiap individu besegera menunaikan hak saudaranya. Prilaku atau tindakan baik kepada sesama manusia sudah menjadi bagian hidup atau prinsip. Inilah contoh sikap kedewasaan yang hadir dalam pribadi yang menghargai keragaman. Sikap ini dapat terwujud

ketika seseorang yang bermoral menyadari bahwa semua tindakan dan perilaku yang diperbuat dalam hubungan antar manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Pencipta. Setiap perlakuan ketidakadilan akan diberi sanksi kelak dihadapan Pencipta. Keyakinan teleologis dan monotheis ini menjadikan setiap orang sangat hati-hati dalam memperlakukan orang lain. Jika jati diri yang berdasarkan tawhid adalah kemampuan kultural yang bersifat bersifat vertical, maka perlakuan santun kepada saudara (*ukhuwah*) merupakan kemampuan kultural horizontal yang mungkin terwujud dalam sikap terbuka, dialogis, mudah menolong, dermawan dan sebagainya.

Banyak hal yang dapat dipelajari dari kehidupan masyarakat Madinah dalam rangka pengembangan kesadaran dan kompetensi multikultural. Pertama dalam masyarakat multikultural perlu ada sistem politik yang berkeadilan sosial. Artinya kelompok pemegang kekuasaan menyadari bahwa perlu payung politik dan hukum yang sensitive terhadap hak kelompok minoritas. Di sini juga sebaliknya kelompok minoritas perlu memiliki sikap menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan memiliki komitmen terhadap keutuhan negara-bangsa. Semua pihak punya kemampuan pengendalian diri.

Kedua, adalah kepribadian dan jati diri yang kuat (*integritas moral*) berakar pada keyakinan dan kematangan dalam pengamalan agama. Keyakinan bukan sebuah dogma yang berharga mati, tetapi adalah dinamika yang bersifat teleologis dengan bermuara pada keyakinan adanya kehidupan sesudah kematian di mana semua ketidak adilan hari ini akan ditegakkan nanti. Dalam bahasa agama disebut Iman. Artinya pribadi yang punya jati diri yang kuat (*integritas moral*) adalah pribadi yang beriman. Keimanan yang benar akan mendorong seseorang untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai pencipta, sehingga setiap perintah dan larangan dimaknai dan diterapkan sebagai standar moralitas atau etika dalam memperlakukan orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang penulis Muslim (Khaleed Abou el Fadhl) dalam Boston

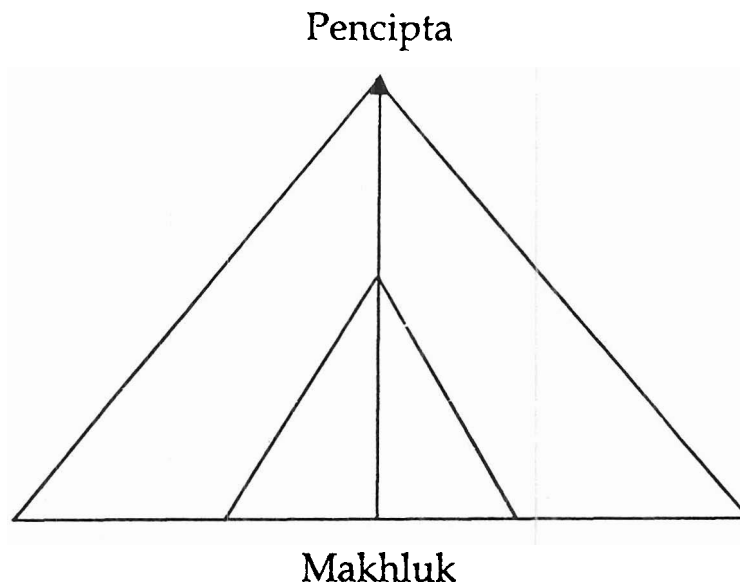
Review. Com (diunduh 12-12- 2012) ketika memberi tulisan balikan terhadap tuduhan Islam tidak toleran yang dilontarkan barat:

If we read the text with moral and historical guidance, we can see the different passages as part of a complex and layered discourse about reciprocity and its implications in the historical situation in Mohammed's Medina. In part, the chapter exhorts Muslims to support the newly established Muslim community in Medina. But its point is not to issue a blanket condemnation against Jews and Christians (who "shall have their reward with their Lord"). Instead, it accepts the distinctiveness of the Jewish and Christian communities and their laws, while also insisting that Muslims are entitled to the same treatment as those other communities. Thus it sets out an expectation of reciprocity for Muslims: while calling upon Muslims to support the Prophet of Islam against his Jewish and Christian detractors, it also recognizes the moral worth and rights of the non-Muslim "other."

(jika dipahami teks al Quran dengan bimbingan sejarah dan moral akan terlihat sisi lain yang sangat berbeda sebagai wacana yang komplek dalam islam tentang makna *reciprocal* (toleransi) sebagai terjadi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw di Madinah. Ketika umat Islam membangun masyarakat Madinah justru masyarakat Yahudi dan Nasrani adalah bagian yang diberi tempat dalam konstitusi yang diberi perlakuan sama sebagai warga Madinah; setiap Muslim dan Yahudi serta nasrani punya kewajiban moral yang sama untuk saling memperlakukan dengan baik)

Ketiga, dalam masyarakat multikultural hubungan antar pribadi merupakan wujud toleransi yang didasari pada sikap saling menghormati. Kelompok mayoritas memberi pengakuan terhadap kelompok minoritas sebagai saudara sebangsa dan berhak mendapat posisi yang setara dalam konteks politik sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya kelompok minoritas, perlu sikap tahu diri untuk tidak menguasai dan menentang kelompok mayoritas. Sikap dan perilaku tersebut merupakan wujud "kedewasaan" kultural yang menjadi kepribadian seseorang, yang bisa dindikasikan dengan kemampuan dialogis,

berpikiran terbuka, dermawan, mudah menolong. Bila digambarkan dalam satu diagram wujud pribadi tersebut adalah seperti berikut:



Gambar 4
Kerangka konseptual kedewasaan kepribadian multikultural
(Matured Personality)

Garis vertical Makhluk-Pencipta (M-P) menunjukkan hubungan pribadi dengan Pencipta. Hubungan ini bukan sekedar formalitas, tetapi terwujud dalam kepribadian yang punya pandangan monotheistic (keyakinan Keesaan Tuhan) dan teleologis (kehidupan dan keadilan setelah kematian). Implikasi dari keyakinan tersebut adalah wujud dalam hubungan sesama makhluk (M-M) yang bertanggungjawab, toleran, dan saling menghormati. Diagram tersebut adalah cermin "kedewasaan" atau kematangan seseorang yang mampu bersikap adil, tidak diskriminatif dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda.

Kepribadian yang dewasa bukan kepribadian yang kaku dan dogmatis, tetapi sangat dinamis yang bergerak dalam perbaikan kualitas hubungan M-P. maka akan mempengaruhi kualitas hubungan M - M. Setiap saat pribadi yang dewasa secara kultural senantiasa mengevaluasi diri dalam konteks

keyakinan kepada ke Esaan Pencipta, dan ketaqwaan untuk menjaga batas-batas keadilan sehingga tidak menimbulkan penindasan terhadap orang lain. Bila diringkas dari diagram akan tampak karakteristik pribadi yang dikatakan dewasa secara multikultural atau disebut sebagai kompetensi kultural yaitu: memiliki keteguhan iman dan ketaqwaan sebagai prinsip hidup, memiliki sifat ukhuwah atau rasa persaudaraan yang kuat (dialogis, berfikiran terbuka, dermawan, mudah menolong), memiliki perilaku yang adil atau tidak diskriminatif dalam berinteraksi dengan orang lain.

Cerminan kepribadian yang dewasa adalah target pendidikan multikultural. Bagaimana rancangan pendidikan bergerak dalam upaya mengembangkan kesadaran (*multikultural awareness*) dan kemampuan (*multikultural competence*) dari pendidik dan anak didik. Kesadaran adalah awal dari pembentukan kemampuan. Untuk ini pendidikan multikultural tidak cukup sekedar seleberasi budaya yang beragam tetapi perlu adanya dialog yang mendalam dan kritis dalam pendidikan untuk menggali sistem keyakinan yang melandasi cara-cara memperlakukan orang lain.

Pendidikan seperti ini berjalan dalam bentuk pendidikan yang tidak *indoktrinatif*, tetapi dalam ruang *transformative* dimana guru dan siswa sama-sama subjek belajar yang saling merefleksi untuk menggali kesadaran diri tentang hakikat diri dan keberadaan orang lain yang berbeda, kemudian sama-sama mengambil keputusan membuat tindakan yang dewasa (Moeis, cs 2010: 397). Pendidikan ini disebut dengan istilah Pendidikan Multikultural Transformatif.

Berikut adalah uraian yang akan membantu pembaca memahami lebih jauh hakikat pendidikan tersebut yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

B. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sebagai bagian pendidikan di sekolah, memiliki dimensi yang luas. Di Indonesia, kebutuhan

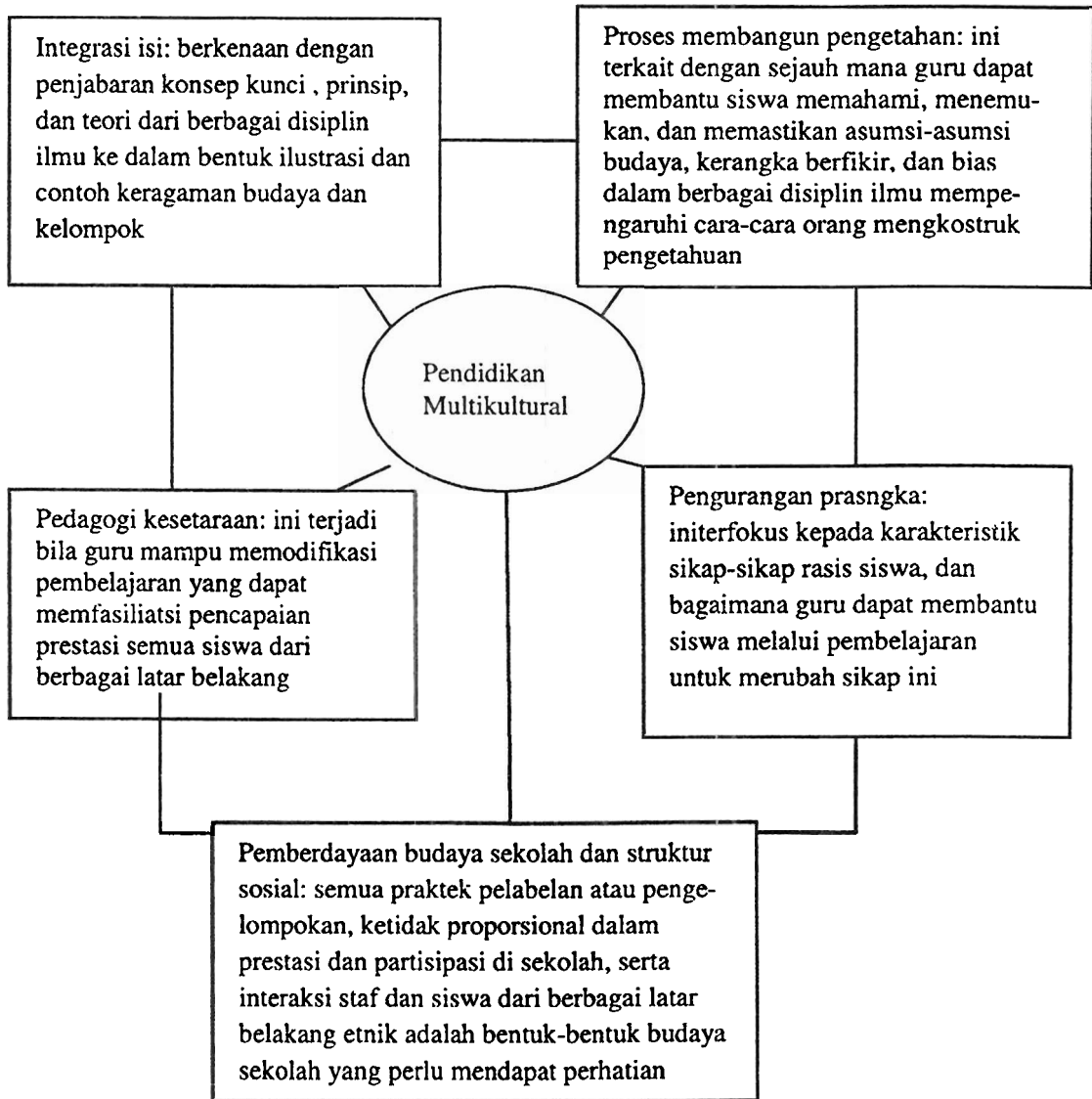
terhadap perlunya pendidikan multikultural sudah lama diwacanakan. Hanya saja dalam praktek di sekolah guru melihat pengembangan prinsip multikultural sebatas pengenalan adanya keragaman budaya dan keharusan untuk menghormati keragaman. Sejalan dengan itu, materi pembelajaran yang terkait dengan multikultural adalah penyajian keragaman adat istiadat, tarian, pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pada hakikatnya Pendidikan Multikultural yang dimaksud dalam tulisan ini, lebih dalam dari apa yang sedang dilakukan guru saat ini di sekolah. James Bank (1999: 13-17) memperkenalkan dimensi-dimensi dari pendidikan multikultural dalam lima ranah: 1) Integrasi isi (*content integration*); 2) proses mengkonstruksi pengetahuan (*the knowledge construction process*); 3) pengurangan prasangka (*prejudice reduction*); 4) pendidikan kesetaraan (*an equity pedagogy*); 5) memberdayakan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and sosial structure*). Kelima dimensi tersebut dapat dilihat pada gambar 5 di bawah.

Konsep pendidikan multikultural seperti yang digagas Bank di atas, relevan untuk diterapkan saat ini dalam konteks pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan wacana penyederhanaan jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah untuk kurikulum 2013, pengintegrasian isi pendidikan multikultural ke dalam mata pelajaran terkait merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan. Tanpa mengganggu isi dan tuntutan kurikulum mata pelajaran terkait, konsep kunci, prinsip dan generalisasi dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan pendidikan multikultural dapat dikembangkan oleh guru. Selain itu proses pengitegrasian ini juga akan merangsang keterampilan berfikir kritis dan kemampuan partisipatif sebagai upaya pembentukan sikap-sikap multikultural.

Mata pelajaran terkait yang dapat menjadi bagian pengitegrasian pendidikan multikultural diantaranya adalah Pendidikan IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua mata pelajaran ini dipelajari oleh siswa dalam semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu pada kedua mata pelajaran ini perlu

keterampilan khusus dari guru-guru untuk mengintegrasikan konsep-konsep multikultural ke dalam pembelajaran.



Gambar 5. Dimensi Pendidikan Multikultural (adaptasi dari Banks 1999:14)

Keterampilan ini diawali dengan kemampuan guru dalam menganalisis konsep-konsep kunci yang terkait dengan pendidikan multikultural dalam IPS atau PKn, kemudian menjabarkan konsep ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Keterampilan selanjutnya adalah mengembangkan

kegiatan inti pembelajaran dalam berbagai strategi yang merangsang kemampuan kognitif, sikap, dan perilaku siswa. Terakhir adalah keterampilan merancang proses reflektif dan penilaian yang berorientasi kepada proses, sehingga siswa dan guru secara bersama dapat memonitor pengembangan kesadaran dan kompetensi multikultural yang ditargetkan dalam pembelajaran.

Untuk memudahkan guru dalam menganalisis isi kurikulum dan mengintegrasikan pendidikan multikultural perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Pertama guru memahami tujuan pendidikan IPS/PPKn dan Pendidikan Multikultural. Menurut Banks and Clegg (1985:7) ranah tujuan pembelajaran IPS termasuk Pendidikan Kewarganegaraan berada dalam empat area utama yaitu: 1) pengetahuan (*knowledge*), 2) keterampilan (*skills*), 3) sikap dan nilai, 4) tindakan warga negara. Pendapat ini sejalan dengan komponen-komponen pendidikan dalam masyarakat demokratis yang dikemukakan oleh John Patrick (1999: 34) terdiri atas empat ranah yaitu: 1) pengetahuan (tentang kewarganegaraan dan pemerintahan), 2) keterampilan kognitif, 3) keterampilan partisipatoris, 4) kebajikan dan sikap warganegara. Dibanding dengan cakupan isi mata pelajaran sebagai tercantum dalam Permendiknas No 22 tahun 2006, IPS dan PKn termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian yang memiliki cakupan isi sebagai berikut:

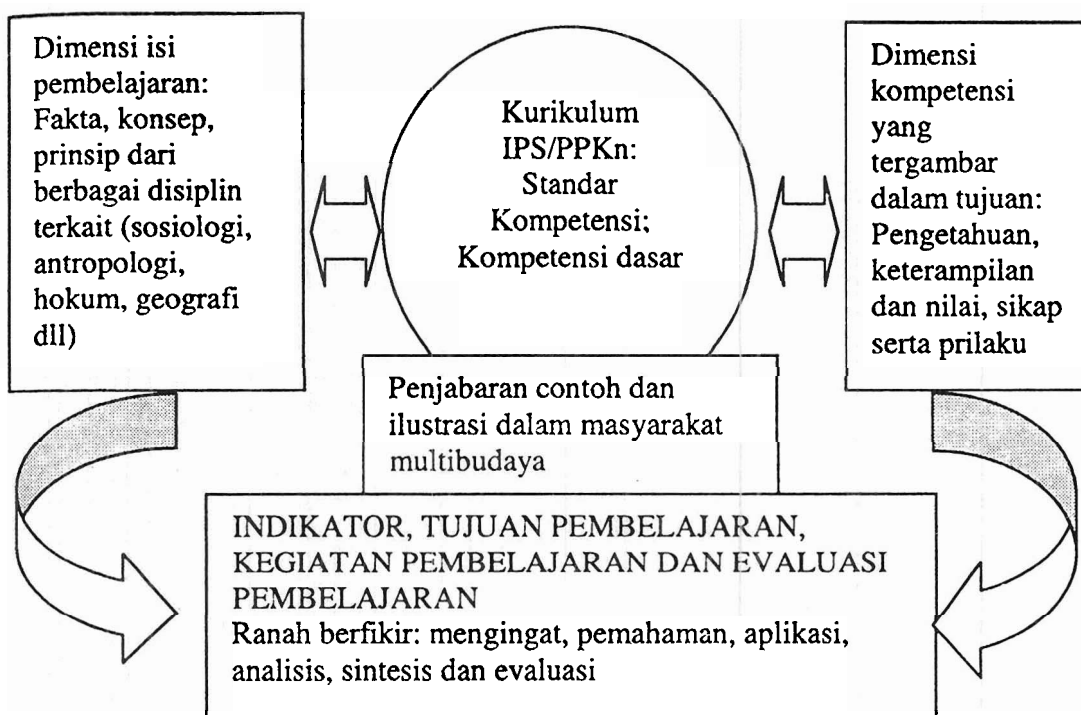
“Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan peserta didik mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jika dicermati isi cakupan mata pelajaran tersebut tampak bahwa pembelajaran IPS/PPKn termasuk pendidikan Multikultural adalah satu rumpun. Ruang lingkup tujuan yang dapat disimpulkan dari standar isi juga meliputi :pengetahuan, keterampilan (berfikir dan sosial), partisipasi, nilai dan tindakan

Dari uraian di atas, tampaknya tujuan Pendidikan IPS, PKn dan Pendidikan multikultural bertemu dalam titik yang sama yakni:

- a. Tujuan yang berorientasi kepada pengembangan pengetahuan warga negara. Sejalan dengan fenomena masyarakat global, mobilitas sosial, mobilitas informasi yang demikian cepat, maka kehidupan masyarakat semakin heterogen. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan yang multidisiplin sehingga siswa mampu membuat keputusan yang reflektif, kritis serta rasional dalam kehidupannya. Pengetahuan ini, digali dari berbagai konsep dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan IPS/PPKn dan multikultural.
- b. Keterampilan, maksudnya adalah keterampilan intelektual dan sosial, serta partisipatoris. Keterampilan intelektual tercermin dalam kemampuan mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kritis dan berpengetahuan. Keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi, dan hidup berdampingan dengan semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama. Keterampilan sosial juga mencakup keterampilan komunikasi dan interaksi lintas budaya. Terakhir keterampilan partisipatoris adalah, keterampilan menganalisis kebijakan dan berpartisipasi aktif mempengaruhi kebijakan publik yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dengan beragam budaya.
- c. Nilai, sikap dan perilaku, adalah tujuan yang memberi peluang kepada siswa untuk menentukan nilai-nilai yang baik secara kritis dan reflektif, kemudian menetapkan sikap dan tindakan secara otonomi dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat multikultural.

Bila dilihat dari segi isi, pembelajaran IPS/PPKn dan Pendidikan multikultural adalah berupa fakta, konsep, prinsip dan teori dari berbagai disiplin ilmu yang terkait seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik, geografi dan humaniora. Pengembangan isi pembelajaran ini tergambar dalam penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam bentuk indikator dan tujuan dengan tetap memperhatikan tingkat berfikir siswa berdasarkan taksonomi Bloom. Bila digambarkan ketiga dimensi di atas yaitu ranah tujuan, isi pembelajaran, tingkat berfikir maka akan tampak kerangka berfikir pengintegrasian pendidikan multikultural dengan IPS/PPKn sebagai berikut:



Gambar 6 Kerangka berfikir pengintegrasian isi pendidikan multikultural ke dalam IPS/PPKn

Proses pengintegrasian isi pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran IPS/PPKn dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

- a. Mempelajari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam kurikulum IPS/PPKn, untuk memastikan bidang ilmu terkait dalam setiap SK dan KD.

Contoh :

SK: Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

KD:

1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia
2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara
3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Bidang Ilmu terkait untuk mempelajari SK/KD adalah: Ilmu Kewarganegaraan, Ilmu Politik, Sosiologi, dan ilmu Hukum.

- b. Merumuskan konsep-konsep kunci , prinsip, dan nilai dari SK /KD, sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang terkait dalam SK/KD

Konsep Utama (IKN): Warga negara, Kewarganegaraan.

Konsep terkait :(Hukum) (Konstitusi, UU): Hak dan Kewajiban Warganegara, Kebijakan pendidikan.

Konsep Terkait: (ilmu Politik): nasionalisme, NKRI

Konsep terkait (sosiologi): masyarakat multikultural

Prinsip:

1. Kedudukan , hak, dan kewajiban warganegara diatur dalam UUD dan UU untuk menjaga keutuhan NKRI
2. Semangat nasionalisme dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya akan terpelihara, jika setiap warganegara mentaati hukum, dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa (NKRI)

Nilai /sikap/prilaku:

Sikap dan Upaya nyata untuk menjaga semangat nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Mengembangkan Rencana Pembelajaran dengan mempe-
domani konsep, prinsip dan nilai yang sudah dianalisis dari
SK/KD.

Contoh Indikator:

1. Menjelaskan tentang hakikat warganegara, dan proses
pewarganegaraan
2. Menyimpulkan isi UUD dan UU Pendidikan yang berkaitan
dengan kedudukan, hak, dan kewajiban warganegara.
3. Menganalisis peran masyarakat Indonesia dalam upaya
menjaga keutuhan NKRI
4. Merumuskan upaya nyata warganegara untuk melestarikan
semangat kesatuan dan keutuhan dalam NKRI

Contoh Tujuan

1. Dengan membaca referensi, siswa menuliskan satu ringkasan
tentang arti warga negara, dan proses memperoleh kewar-
ganegaraan,
2. dengan diskusi kelompok siswa mengidentifikasi bentuk-
bentuk hak dan kewajiban warganegara yang dijamin dalam
UUD dan UU Pendidikan.
3. Melalui pengamatan dan wawancara , siswa
mengidentifikasi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban
warganegara di lingkungan sekolah dan masyarakat tempat
tinggalnya.
4. Dengan diskusi kelompok , siswa mengungkapkan 5 upaya
nyata warga negara untuk melestarikan keutuhan NKRI
5. Dengan penugasan penulisan essay singkat, siswa
mengungkapkan sikap dan perilaku dirinya yang perlu
dikembangkannya sebagai wujud partisipasinya untuk
menjaga kebersamaan dalam masyarakat yang beragam.

Selanjutnya. tujuan ini dijabarkan lebih kompleks dalam
bentuk kegiatan pembelajaran dan penilaian unjuk kerja siswa.

Proses analisis seperti ini juga dapat dan bahkan lebih
mudah diterapkan pada kurikulum 2013 yang akan berlaku
secara keseluruhan pada 2015. Karakteristik kompetensi inti (KI)

kurikulum 50 % menyangkut sikap (sosial dan spritual) 25 % pengetahuan, dan 25% keterampilan (partisipasi). Secara ringkas karakteristik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

ASPEK	KATA KUNCI	ISI
SIKAP terjabar pada Kompetensi inti 1 & 2 (Pribadi yang berkarakter religius dan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Menghayati • Mengamalkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai dari ajaran agama • Nilai prilaku sosial
PENGETAHUAN (Kompetensi inti 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami • Menerapkan • Menganalisis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fakta, Konsep, generalisasi, prosedur ➤ Empat pilar kebangsaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila • UUD 1945 • Bhinneka Tunggal Ika • NKRI
PSIKOMOTOR (PARTISIPASI WARGA NEGARA) Terjabar pada Kompetensi inti 4	<ul style="list-style-type: none"> • mengolah • menalar • menyajikan • mengembangkan 	Pengembangan ilmu yang sudah dipelajari

Penyebaran aspek kurikulum tersebut secara jelas dapat diamati pada kompetensi inti 1 sampai dengan 4, dengan kata kunci yang menunjukkan tingkat berfikir yang terentang dari pemahaman hingga sintesa. Dalam hal ini analisis kurikulum akan lebih mudah dimana guru tinggal menemukan konsep dan generaliasasi pada setiap kompetensi dasar sebelum merumuskan rencana pembelajaran yang lengkap.

Analisis isi kurikulum dan proses penjabaran ke dalam bentuk perencanaan pembelajaran adalah dimensi pertama dari pendidikan multikultural yakni pengitegrasian isi ke dalam

kurikulum yang sedang berjalan (IPS/PPKn); kalau dilihat dari aspek tujuan adalah pengembangan pengetahuan (*knowledge*).

Pengintegrasian isi atau pengembangan pengetahuan multikultural dalam konteks pembelajaran merupakan upaya menanamkan konsep-konsep multikultural sebagai dasar bagi siswa untuk mengembangkan perilaku dan nilai multikultural. Karena itu pengintegrasian ini juga mengikuti atau sejalan dengan prinsip-prinsip inkuiri yang melatih siswa untuk :

1. Mencari atau mengumpulkan data dan informasi
2. Berfikir logis, kritis, dan analitik. Hal ini diperoleh ketika siswa belajar menyusun data menjadi konsep dan prinsip dengan hokum-hukum berfikir yang logis, dan menganalisa data sehingga menjadi pengetahuan baginya.
3. Membuat kesimpulan secara rasional
4. Membiasakan siswa bekerja sama, menghargai orang lain dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok
5. Melatih siswa mendengar atau menghormati pendapat orang lain sesuai dengan prinsip demokrasi.
6. Memperoleh pengetahuan yang bermakna dan mampu menerapkannya dalam kehidupan yang lebih luas.

Untuk dapat melaksanakan inkuiri, guru terlebih dahulu mampu mengembangkan pembelajaran atas dasar prinsip atau generalisasi, konsep, dan fakta. Pengembangan ini tidak dalam bentuk blueprint yang diikuti secara teknis, tetapi merupakan pedoman yang bersifat tidak kaku dan akan membantu guru dalam kerjanya ketika pembelajaran berlangsung.

Keterampilan dasar yang harus dimiliki guru di sini adalah kemampuan memilih konsep berdasarkan keilmuan. Kriteria pemilihan konsep ini ditawarkan oleh Hilda Taba (dalam Banks & Clegg, 1985) sebagai berikut:

1. Validitas: apakah konsep itu mencerminkan idea yang tepat dari disiplin ilmu yang dirujuk. Setiap bidang ilmu memiliki konsep-konsep yang menunjukkan karakteristik keilmuan. Misalnya konsep kekuasaan, dan pemerintahan merupakan konsep dalam ilmu politik; konsep norma, interaksi merupa-

kan konsep dalam bidang sosiologi. Dalam pemilihan konsep guru perlu mengetahui apa saja yang menjadi konsep dasar pada setiap bidang ilmu, sehingga ketika menjatuhkan pilihan konsep yang akan dipelajari siswa menjadi dilakukan dengan benar.

2. Signifikansi: apakah idea itu memberikan kebermaknaan bagi sisi kehidupan siswa saat ini. Artinya tidak semua konsep diajarkan pada siswa, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks kehidupan sekarang dan masa datang. Ketika guru memilih satu konsep maka dalam pertimbangan guru harus ada tentang penting atau tidak konsep itu bagi siswa, sehingga dengan pemahaman konsep itu siswa dapat pengetahuan yang bias dikembangkannya sendiri dalam kehidupannya.
3. Ketepatan: Apakah ide tersebut sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kematangan siswa. Pertimbangan lain adalah kematangan siswa. Misalnya konsep manajemen mungkin belum dapat dikuasai siswa kelas rendah dan juga tidak terlalu dibutuhkan dibanding konsep disiplin.
4. Keberlangsungan: Apakah kepentingan ide itu berlangsung lama. Pertimbangan ini merujuk kepada keberlanjutan belajar siswa dalam bidang ilmu yang diwakili konsep tersebut. Jika satu konsep dipelajari maka diharapkan menjadi dasar untuk memahami konsep lanjutan dalam bidang yang sama
5. Keseimbangan: Apakah ide itu mungkin dikembangkan dalam skop yang lebih luas dan dalam, artinya konsep yang dikuasai siswa dapat diterapkannya lagi dalam konteks yang lain. Misalya jika siswa belajar tentang konsep toleransi dalam lingkungan kelas, mungkin dia juga bias mengembangkan dalam lingkungan lebih luas yaitu sekolah atau lingkungan tempat tinggal.

Pada dasarnya dalam proses pengembangan pengetahuan ini guru mulai perencanaan dengan mencari konsep untuk kemudian mengembangkan generalisasi atau prinsip, terakhir

adalah memperkirakan fakta-fakta yang membentuk konsep tersebut.

Untuk aspek tujuan keterampilan (intelektual, sosial, dan partisipasi) dan nilai, dimensi yang terkait adalah pendidikan kesetaraan dan transformasi sikap yang kontra produktif terhadap kehidupan masyarakat multikultural, serta proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pembelajaran. Pengembangan keterampilan dan nilai dalam pendidikan multikultural dilakukan dalam kegiatan pembelajaran melalui pengembangan berbagai pendekatan atau strategi pembelajaran. Variasi pendekatan pembelajaran, dirancang oleh guru pada saat merumuskan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan dicapai melalui satu pendekatan yang mungkin akan berbeda dengan tujuan lain, misalnya jika ada 5 tujuan pembelajaran kemungkinan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan 3 pendekatan. Dalam setiap pendekatan akan ada proses mengkonstruksi pengetahuan, mengembangkan keterampilan (berfikir, sosial, partisipasi) dan proses pemantapan nilai.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan dimensi-dimensi pendidikan multikultural dengan dimensi-dimensi IPS/PPKn, secara sederhana dapat dibaca dalam tabel berikut:

Dimensi Pendidikan Multikultural	Aspek Tujuan pembelajaran IPS/PPKn	Wujud dalam Pembelajaran IPS/PPKn
Integrasi isi	Pengetahuan	Pengembangan Konsep, prinsip, dan nilai dari berbagai disiplin ilmu terkait
Pendidikan kesetaraan, pengurang prasangka, dan konstruksi pengetahuan	Keterampilan intelektual, sosial, dan partisipasi Komitmen nilai dan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat	Variasi Strategi pembelajaran dan prosedur penilaian.
Iklim sekolah dan struktur sosial	Partisipasi nyata siswa sebagai warga negara dan masyarakat multikultural	Unjuk kerja nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Gambar 7. Keterkaitan dimensi Pendidikan Multikultural dengan dimensi IPS/PPKn

Pengembangan pembelajaran multikultural bukan sekedar transfer pengetahuan. Tetapi, pembelajaran adalah proses membangun kesadaran (*multicultural awareness*) dan kompetensi (*multicultural competence*). Pada akhirnya adalah transformasi diri dan lingkungan sosial. Pendidikan yang bersifat transformatif merupakan proses dimana guru dan siswa adalah subjek belajar; guru dan siswa sama pemilik terhadap belajar, karena itu guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan melalui reflektif yang dimulai dari proses mengenali identitas diri dan melihat kelebihan dan kekurangan dalam konteks hubungan dengan orang lain yang berbeda, kemudian memperbaiki kekurangan, dan melakukan perubahan. Joan Wink (2000: 129) mengungkapkan kekhasan pendidikan transformatif dalam dua hal. Pertama dirancang agar siswa membangun pengetahuannya secara konstruktif dan menggunakan pengetahuan itu untuk perubahan diri dan lingkungan sosial. Kedua, kegiatan pembelajaran dirancang dalam prinsip demokratis. Dari proses pembelajaran dengan pendekatan kritis, siswa dan guru bersama-sama membangun kesadaran dan kompetensi multikultural yang berkaitan dengan diri (perubahan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip multikultural) dan berkaitan dengan orang lain (perubahan cara-cara memperlakukan orang lain dengan lebih empati) atau dapat disebut dengan kecerdasan sosial.

Gagasan terkait dengan pendidikan transformative adalah pendidikan kritis (*Critical pedagogy*). Adagium yang terkenal dari pendekatan kritis adalah perubahan atau transformasi masyarakat terjadi melalui pendidikan. Dalam pandangan penganut pendidikan kritis, bahwa sistem pendidikan adalah refleksi dari sistem sosial yang didalamnya ada ketidakadilan, diskriminasi, prasangka yang tumbuh dari kekuasaan yang dapat saja berdasarkan ras, suku, strata sosial, status ekonomi dan sebagainya. Ketidakseimbangan sistem sosial tersebut juga masuk ke dalam diri setiap orang baik guru, siswa, kepala sekolah, orang tua dan semua unsure pendidikan. Tugas pendidikan kritis adalah mempertanyakan akar-akar ketidak

adilan atau diskriminasi tersebut dan merubahnya melalui perubahan diri, dan perubahan lingkungan sehingga tercipta lingkungan sosial yang saling menghargai dengan prinsip kesetaraan.

Ramin Akbari (2008) memberikan satu catatan ringkas tentang bagaimana melakukan satu transformasi dalam pendidikan melalui penggunaan pendidikan kritis dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Dia bertolak dari dasar pemikiran bahwa bahasa adalah bagian dari sistem sosial, karena itu proses pembelajaran bahasa seyogyanya dimulai dari mempertanyakan akar-akar ketidakadilan sosial dan merubah ketidakadilan itu untuk menjadikan sistem pembelajaran yang inklusif, setara, dan kondusif. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh pengajar profesional.

Pertama, mentransformasi kelas, yakni mengembangkan iklim kelas berdasarkan budaya lokal siswa. Dalam pembelajaran bahasa budaya adalah bagian dari bahasa dan kebanyakan buku teks pembelajaran bahasa berisi budaya dari bahasa target, yakni budaya dari masyarakat pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Dalam perspektif pendidikan kritis cara seperti ini telah menjauhkan siswa dari budayanya sendiri. Oleh karena itu jika komunikasi dan pembelajaran didasarkan pada budaya lokal, maka siswa akan menyadari kondisi yang terdapat dalam lingkungan budayanya, dan akan mampu melakukan proses perubahan dalam kehidupan masyarakatnya.

Kedua, menggunakan potensi siswa dalam pembelajaran. Bagi pembelajar bahasa, bahasa ibu adalah terkait dengan identitas. Oleh karena itu dengan memanfaatkan potensi siswa yang sukses dalam pembelajaran bahasa pertama, maka berarti guru menempatkan siswa belajar dengan dirinya sendiri dan memberikan rasa senang dalam belajar bahasa asing.

Ketiga, perhatikan lebih banyak lagi suasana kehidupan nyata dari siswa dalam proses pembelajaran, termasuk kebutuhan siswa. Perbedaan kebutuhan ini dapat terjadi disebabkan daerah asal, status ekonomi, afiliasi politik. Dalam

praktek pembelajaran guru mengkondisikan pembelajaran dengan berbagai konteks yang dekat dengan siswa dan siswa diajak membicarakan isu-isu yang berkembang dalam masyarakatnya atau lingkungannya.

Keempat, kondisikan siswa untuk menyadari adanya kelompok-kelompok yang termarginalisasi. Dalam masyarakat banyak kelompok-kelompok minoritas yang dipinggirkan dalam sistem sosial yang ada. Melalui pembelajaran siswa memngungkap ketidakadilan dan sumber-sumber ketidakadilan yang menyebabkan adanya kelompok-kelompok yang diperlakukan tidak adil.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat dilihat bahwa isi pendidikan transformatif adalah pendidikan kritis. Dalam pembelajaran multikultural proses menggali dasar-dasar ketidakadilan sosial dan kecurigaan antar kelompok merupakan awal membuka kesadaran diri untuk merubah ketidakadilan. Sumber dari ketidakadilan itu salah satunya ada dalam sistem berfikir seseorang, karena itu proses perubahan juga dimulai dari perubahan sistem berfikir. Dari kesadaran ini siswa atau pembelajar akan melakukan perubahan menuju penguasaan kompetensi cultural yang mampu menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan saling menghormati.

C. Daftar Bacaan

Adian Husaini (2005) *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Akbari, Ramin (2008) Transforming lives: introducing critical pedagogy into ELT classrooms. ELT Journal Volume 62/3July 2008; D0110. 093/ELT/CCNO25. Published by Oxford University Press; all rights reserved.

Aly, K (1996) *Sejarah Islam (Tarikh Pra Modern)*. Jakarta: Srigunting

Banks, James (1999) *an Introduction to Multikultural Education*. New York: Allyn & Bacon

- Borradori, Giovanna (2005) *Filsafat Dalam Masa Teror: Dialog dengan Jurgen*
- Habermas dan Jacques Derrida (*Edisi Terjemahan, Alfons Taryadi*)
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Emerick, Yahya (2002) *The Life and Work of Muhammad*.
 Indianapolis, IN: A Pearson Education Company
- Goleman, Daniel (2006) *Sosial Intelegence*. New York: Bantam
 Dell, Random House
- Moeis, Isnarmi (2009) *Multikulturalism In Liberal and Islamic Perspectives: A Philosophical Review: EDUCARE an International Journal Vol 2. No 1, Agustus 2009 p: 7-14*
- Moeis, Isnarmi , Al Rafni, Junaidi Indrawadi (2010) *Otoritas Guru dalam Konteks Pendidikan Kritis di SMA Negeri Padang, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 16 no 4, Juli 2010 Hal: 391-399*
- Patrick, John (1999) "Concepts at the Core of Education for Democratic Citizenship",
 dalam Bahmueller , Charles & Patrick, John (eds) *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*:
 Indianapolis, IN: ERIC Clearinghouse
- Ritzer, George & Smart, Barry (2001) *Handbook Teori Sosial*.
 Bandung: NusaMedia.
- Thoha, Anis Malik (2005) *Tren Pluralismee Agama: Tinjauan Kritis*.
 Jakarta: Perspektif
- Gema Insani
- Watson, C.W (2000) *Concepts in Sosial Sciences: Multikulturalism*.
 Philadelphia: Open University Press.
- Wink, Joan (2000) *Criitical Pedagogy: Note from the Real World*.
 New York: Longman

Zakaria Al Kandhalawi, Maulana Muhammad (2007) *Fadilah Sedekah*. Edisi Terjemahan. Bandung: Pustaka Ramadhan

Sumber Internet

M. Abdulsalam (2006) *The Tolerance of the Prophet towards Other Religion,)*: [www. IslamReligion.com](http://www.IslamReligion.com) (diunduh 20 September 2012)

BAB III

MODEL PENGELOLAAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Fokus pembicaraan dalam bab ini adalah upaya-upaya pengelolaan berbagai sumber konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat multikultural (Indonesia). Pembahasan ini dimaksudkan untuk memahami berbagai potensi yang ada dalam masyarakat baik berupa konflik, atau perkembangan identitas kelompok dalam masyarakat, dan juga pola-pola perubahan yang semuanya mungkin dapat menjadi sumber perpecahan atau disintegrasi kesatuan bangsa yang beragam. Bagian pertama membicarakan tentang teori terbentuknya identitas; bagian kedua akan membicarakan berbagai teori konflik serta pengelolannya.

A. Identitas Kelompok dan Masyarakat Multikultural

Akar identitas dalam masyarakat terletak dalam banyak aspek seperti perbedaan etnik, ras, agama, dan jender. Namun bentuk yang tertua dan banyak diikaji adalah dari sudut ras dan etnik, sedangkan bentuk yang lain mengikuti perkembangan ras dan etnik. Misalnya, agama pada umumnya dan awalnya berasal dan paralel dengan perkembangan etnik, demikian juga identitas jender berkembang dalam konteks etnik dan agama dan begitu seterusnya.

Ada dua istilah yang kerap digunakan ketika orang berbicara tentang perkembangan identitas kelompok: ras dan etnisitas. Keduanya saling berkaitan tetapi memiliki perbedaan makna.

Diana Kendall (2003: 302) memberikan batasan kedua istilah ini sebagai berikut:

- *“race is a category of people who have been singled out as inferior or superior, often on the bases of real or alleged physical characteristics such as skin color, hair texture, eye shape or other subjectively selected attributes*
Although disputed by some natural scientists (biologists), contemporary sociologists emphasize that the significance of race is a socially constructed. The social meaning of that people attach to race is more significant than any biological differences that might exist between people placed in otherwise arbitrary categories. Racial categories based on phenotypical differences do not correlate with genotypical differences.
- *An ethnic group is a collection of people distinguished primarily by kultural or national characteristics, including... unique kultural traits a sense of community a feeling of ethnocentrism ascribed membership territoriality “*

Dari definisi Kendall di atas dipahami, bahwa kelihatannya istilah ras cenderung bernuansa negatif, karena di situ ada pengelompokan yang tidak netral. Artinya ketika orang berbicara tentang ras, maka di dalamnya ada makna superior dan inferior. Sedangkan istilah etnik lebih netral, karena hanya menyangkut pengelompokan dengan identitas yang biasanya berkaitan dengan karakteristik budaya atau kebangsaan.

Kedua istilah itu mengandung makna dan implikasi yang berbeda, meskipun sering digunakan orang secara bergantian (Macionis, 1993: 320). Ras menunjukkan pengelompokan orang memiliki kesamaan warisan biologis seperti warna kulit, dan rambut. Akan tetapi, dalam perkembangannya pengelompokan itu dipertegas secara sosial (*socially constructed*). Perkembangan ras terjadi, karena adanya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dan mendorong terjadinya perkawinan antar ras yang berbeda sehingga memunculkan lagi ras-ras yang baru. Meskipun sebenarnya realitas ras adalah sesuatu yang bersifat biologis, tetapi banyak orang atau masyarakat menempatkan kategori ras dalam sistem hirarki yang secara

sosial tidak setara. Bahkan hirarki itu diklaim juga berdasarkan perbedaan inteligensi .

Di sisi lain etnisitas merujuk kepada pengelompokan orang berdasarkan warisan sosial budaya. Kesamaan orang dalam satu kelompok etnik ditandai dengan kesamaan bahasa, adat istiadat, budaya, dan juga agama yang pada akhirnya kesamaan-kesamaan itu membentuk identitas sosial. Ada ahli yang sedikit berbeda menyatakan pendapatnya bahwa etnisitas merujuk kepada perasaan bersama "*a sense of peoplehood*", merasa menjadi bagian dari suatu kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan, namun di dalamnya terkandung pula aspek-aspek biologis dan budaya (Mendoza & Napoli, 1990: 96).

Pandangan yang melihat perkembangan etnisitas sebagai unsur budaya dan biologis, melahirkan dua perspektif tentang etnisitas (Yoon, 1988). Pertama melihat etnisitas dalam perspektif primordial dan lainnya sebagai konstruksi social. Perspektif primordial melihat etnisitas sebagai atribut yang sudah tetap dan tidak dapat dirubah (termasuk unsur biologis), sedangkan konstruksi social melihat etnisitas terjadi sebagai suatu konstruk yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya kepentingan bersama, kesamaan budaya, serta kegiatan bersama.

Pandangan yang melihat perkembangan etnik, tanpa mengaitkan dengan konteks sosio historis merupakan pandangan tradisional (Galkina, 1990). Pada awalnya sosiolog melihat fenomena etnik atas dua pandangan yaitu: "*primordialisme*", yang bermakna kesatuan dan solidaritas yang bersifat irrasional, dan "*strukturalisme (instrumentalisme)*", berupa ideologi yang dimanipulasi secara rasional atau diadaptasi secara sadar untuk mencapai tujuan. Akan tetapi kajian etnisitas dari sudut pandang ini bergeser ke arah pandangan melihat perkembangan identitas etnik sebagai rangkaian proses yang kompleks, dikonstruksi melalui fakta-fakta sejarah dari para pendahulu mereka dan fakta-fakta sosial lainnya termasuk pandangan tentang etnik lainnya.

Pandangan ini didukung oleh kelompok yang menempatkan fenomena etnik dan pembentukan identitas etnik sebagai sesuatu yang dapat berubah dan dipelajari. Dari suatu penelitian, terbukti bahwa identitas etnik merupakan integrasi etnisitas dengan konsep diri seseorang yang berasal dari pengenalan utuh tentang etnisitas dan diikuti dengan pembentukan identitas diri yang berasal dari nilai dan keyakinan yang berkembang dalam kelompok (Guanipa & Guanipa, 1998). Demikian juga penelitian lain menemukan bahwa bacaan siswa tentang keragaman budaya mempengaruhi pikiran dan kebanggaan terhadap kelompok etnik mereka, dan juga meningkatkan pengetahuan tentang kelompok etnik lain (Lee, 2000: 564).

Penelitian terkait adalah tentang bagaimana memahami identitas etnik masyarakat Penang Belangan dalam Skema pemukiman masyarakat di Sungai Asap Serawak oleh Kelvyn Egay (2008 p 249). Untuk menganalisa identitas "menjadi Penan" dalam skema pemukiman di Sungai Asap, Egay menggunakan pendekatan yang melihat kategori etnik sebagai proses yang berkelanjutan dalam dekonstruksi dan rekonstruksi, bukan sebagai puncak dari analisis structural semata. Sebagai aplikasinya dia melihat proses pendefinisian identitas masyarakat ada dua: defines yang diberikan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah, NGO dsb) dan definisi yang berkembang sehari-hari. Dalam pelabelan masyarakat Penan dalam definisi pemerintah, gagal memahami sisi lain dari identitas masyarakat Penan dalam konteks kontemporer. Oleh sebab itu pendefinisian identitas Penan lebih tepat dilihat dalam konteks keseharian di mana pelabelan identitas terus berkembang sesuai aktifitas masyarakat dalam kesehariannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, ada penegasan ahli bahwa dalam pembentukan identitas etnik ada suatu proses identifikasi yang diperbaharui terus menerus (Mooradian, 1996: 2); proses itu disebut juga sebagai proses belajar (Horowitz, 1981: 119). Melalui suatu penelitian terhadap pembentukan identitas bagi mahasiswa dari etnik Asia Pasifik Amerika berdasarkan pengalaman selama bersekolah, Shozo Kawaguchi (2003)

membuktikan bahwa identitas sebagai kelompok etnik minoritas dari mahasiswa tersebut terbentuk karena pengalaman diskriminatif dan prasangka yang dialaminya selama bersekolah. Sama halnya dengan pengalaman kelompok minoritas lain yang mengalami perkembangan dan penguatan identitas etnik karena pengalaman negatif yang diterima langsung atau melalui pesan media massa. Identitas ini disebut sebagai "*conscious ethnic development*" (Chavez & Guido-DiBrito, 1999:40). Hasil penelitian yang senada terhadap siswa Cina (Wiriaatmadja, 1992) juga menunjukkan bahwa identitas kebangsaan bagi siswa tersebut mendapat peneguhan melalui pengalaman belajar (kurikuler dan ekstrakurikuler).

Selain karena faktor belajar secara langsung, penguatan identitas etnik juga terjadi karena hirarki ras dan etnik dalam masyarakat. Hirarki diintensifkan oleh adanya kontak antar kelompok yang berbeda, dengan faktor yang beragam seperti kekuatan politik, sosial, dan ekonomi (Chang & Dood, 2001). Lebih jauh dijelaskan mekanisme penghirarkiaan dimulai dari adanya persaingan untuk memperoleh keistimewaan yang lebih besar, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk memegang hegemoni dari satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sebaliknya, orang yang berada pada posisi rendah dalam hirarki akan meningkatkan kesadaran identitasnya untuk menentang hegemoni kelompok lain. Bagi kelompok tertekan atau minoritas, identitas kelompok disadari dan berkembang secara kuat; tetapi bagi kelompok mayoritas, identitas etnik tidak disadari dan berjalan sebagai kebiasaan sehari-hari (Chavez & Guido Dbrito, 1999:39)

Ada ahli yang melihat hirarki etnik merupakan tahap menuju masyarakat plural (Marger, 1985: 86). Hubungan antar etnik dalam masyarakat dimulai dari tahap interaksi (kontak) yang bersifat setara. Selanjutnya berkembang menjadi kompetisi dan stratifikasi (antara satu kelompok dengan yang lain saling bersaing mendapatkan sumber-sumber sehingga tercipta stratifikasi etnik). Tahap berikutnya terjadi tiga kemungkinan bentuk masyarakat multietnik yakni, 1) asimilasi yang membawa

kepada integrasi antar etnik dan peleburan; 2) pluralisme tidak setara berupa adanya kelas atau kasta-kasta yang memisahkan kelompok etnik secara sosial dan kultural dan perbedaan akses terhadap kekuasaan dan hak-hak istimewa yang besar antara kelompok tinggi dengan kelompok rendah; dan 3) pluralisme setara yang membentuk negara pluralis dan melahirkan otonomi politik .

Pandangan ini tergolong optimis dengan melihat kemungkinan bahwa stratifikasi etnik sebagai satu tahap menuju masyarakat multikultural, yang disebutnya dengan pluralisme setara. Namun dalam kenyataannya, proses menuju masyarakat multikultural bukan hal yang sederhana. Terbukti dari beragamnya kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara bangsa dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari kemajemukan masyarakatnya.

Menurut Milton Esman (2000) dari *The Cornell University* ada tiga kemungkinan bentuk penanganan masyarakat majemuk. Pertama, disebut "*deplurazing society*" yakni dengan menyingkirkan semua teritorial khusus kecuali kelompok nasionalis dominan. Pandangan ini didasarkan pada premis bahwa masyarakat yang beragam secara etnik menyimpan konflik secara inheren, dan kelompok minoritas dikhawatirkan akan memiliki loyalitas ganda dan bahkan melakukan subversif, sementara kelompok etnik dominan secara moral telah lama sebagai pemilik wilayah. Bentuk yang paling manusiawi dari pendekatan ini adalah kebijakan asimilasi.

Kedua, pandangan yang mengakui bahwa solidaritas etnik merupakan fenomena tidak terbandung, maka perlu pembatasan akses politis dari solidaritas etnik di tingkat publik. Semua akses terhadap pelayanan publik, pekerjaan di bidang pemerintahan, kontrak publik, kesempatan ekonomi, dan pilihan tempat tinggal disediakan bagi individu secara kompetitif berdasarkan kriteria pasar atau jasa yang sama sekali mengabaikan etnisitas dan warna kulit. Organisasi politik , sistem pemilihan, dan pesan nyata yang berbaur etnik tidak dibenarkan, tetapi keanggotaan inklusif dalam organisasi profesional, rekreasional, dan

organisasi kesejahteraan didorong dan difasilitasi. Organisasi yang menghidupkan warisan budaya etnik ditolerir, namun tidak dibenarkan sampai ke tingkat kebijakan publik.

Ketiga, strategi yang mengakui keragaman dan solidaritas etnik sebagai realitas yang permanen dan berjangka panjang dalam masyarakat, dan sekaligus juga menghendaki adanya otoritas publik yang mengatur hubungan ini. Ada dua alternatif pendekatan ini yakni berdasarkan dominasi atau berdasarkan pembagian kekuasaan (*power sharing*). Berdasarkan dominasi berupa kontrol aparat negara, militer dan sipil oleh satu kelompok etnik mayoritas. Bahkan kontrol ini diperkuat oleh aturan resmi dan juga ideologi. Sedangkan *power sharing* menghormati perbedaan etnik, sekaligus mengupayakan rasa aman bagi semua komunitas etnik, memberi peluang manajemen diri kolektif dan kesempatan yang sama dalam jaringan otoritas politik yang umum.

Mengingat kompleksnya persoalan penanganan masyarakat majemuk, para ahli mengembangkan berbagai model masyarakat majemuk. Salah satunya model dari Van Den Berghe (1980: 79) yang menggambarkan bentuk masyarakat majemuk dalam 4 dimensi seperti terlihat dalam gambar berikut.

	<i>Ethnically Exclusive Inclusive</i>	
Individual (equal) Incorporation	Nocases A	Liberal Democracy B
Collective (differential) incorporation	Imperial- colonial model C	Consociationa l democracy D

Gambar 8 Model Masyarakat Multikultural

Model A tidak ada contohnya. Dengan model B digambarkan bahwa pemegang kekuasaan dan hak-hak istimewa adalah satu etnik tertentu namun memperlakukan individu secara sama dan atas dasar jasa. Sedangkan dalam model C terlihat ada dua kemungkinan bentuk yaitu: 1) penguasa adalah satu kelompok (*class*) yang berasal dari beberapa kelompok etnik, atau 2) negara secara resmi mengakui individu. Negara secara aktif mendorong integrasi nasional atau mentolerir keragaman bahasa dan budaya tetapi tidak memberikan satu pengakuan resmi yang menjamin hak-hak khusus komunitas tertentu atau memasukkan pluralisme dalam perundang-undangan. Terakhir pada model D, pemegang kekuasaan adalah *grand coalition* dari elit yang memegang kekuasaan bersama dan mendistribusikan kepada etnik konstituen mereka.

Model Bergh ini didasarkan pada dua variabel utama yaitu: 1) sejauhmana tingkat dominasi satu etnik atau gabungan etnik-etnik memonopoli kekuasaan dan hak-hak istimewa untuk menyingkirkan kelompok lain; dan 2) sejauhmana tingkat kerjasama warganegara dari masyarakat plural di dalam negara sebagai anggota individu atau kolektif.

Martin Marger (1985:88) memberikan model dalam dua dimensi. Bila merujuk pada gambar di atas kedua dimensi ini mirip dengan model B yang disebut oleh Marger dengan pluralism liberal, dan model D dengan dengan istilah negara pluralis. Keduanya menganut paham demokrasi, namun ada perbedaan yakni dalam pluralisme liberal unit-unit etnik tidak diakui secara formal tetapi diserahkan pada pilihan individu, sementara dalam negara pluralis unit-unit etnik diakui secara formal oleh pemerintah dengan kekuasaan ekonomi dan politik yang dialokasikan atas dasar formula etnik. Dalam masyarakat yang menganut model negara pluralis perbedaan kultural dan struktural di kalangan kelompok etnik dilindungi oleh negara, serta tersedia perangkat kelembagaan untuk mendorong terjadinya penyebaran keuntungan-keuntungan sosial secara merata dari sisi etnik.

Satu lagi model yang dikemukakan Parsudi Suparlan (2000: 10) dalam menangani kemajemukan masyarakat (Indonesia) merupakan penggabungan model B dan D di atas. Dia bertolak dari konsep Bhinneka Tunggal Ika yang masih perlu dipertahankan dengan beberapa persyaratan yaitu: 1) perlu diciptakan masyarakat sipil yang bebas dari dominasi militer atau peran sosial politik dari militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) berpegang pada prinsip demokrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan bernegara; 3) adanya keseimbangan antara hak pemerintah untuk mengatur mengatur individu dan hak komuniti atau masyarakat, dan dengan hak budaya komuniti atau masyarakat yang tercakup dalam satuan politik; dan 4) perlunya penegakan hukum yang pasti agar warga masyarakat dapat melakukan kegiatan berproduksi sesuai bidang masing-masing untuk kesejahteraan demi kelangsungan hidup. Dalam pandangan ini ada pengakuan hak-hak individu dan komuniti seperti dalam tradisi pluralisme liberal, dan perlu juga kebijakan yang menjamin pengakuan itu seperti dalam tradisi pluralisme gabungan (*corporate/consociational*).

Dalam hal tertentu, model gabungan memiliki keunggulan dalam menciptakan kepastian jaminan kesetaraan dalam masyarakat majemuk. Berdasarkan penelitian pada beberapa negara terbukti, sistem politik yang menggunakan model *gabungan* secara signifikan dapat mengurangi perang antar warga seperti di Belgia, dan Irlandia Utara (Querol, 2003). Sehubungan dengan ini UNDP (2004:50) memberikan penjelasan bahwa "model gabungan" bekerja dalam mekanisme yang disebut dengan *berbagi kekuasaan politik*. Pembagian kekuasaan politik dalam model ini didasarkan pada prinsip proporsionalitas yakni komposisi keragaman dalam lembaga negara mencerminkan komposisi keagamaan masyarakat. Prinsip ini diterapkan dalam empat area kunci yaitu melalui pembagian kekuasaan eksekutif (*executive power sharing*); perwakilan proporsional dalam sistem pemilihan (*proportional representation in electoral system*); otonomi budaya (*provisions for kultural outonomy*); dan perlindungan dari

dominasi dalam bentuk saling veto (*safeguards in the form of mutual vetoes*). Tatanan politik seperti ini dapat mencegah dominasi dari komunitas mayoritas. Beberapa negara seperti Suriname, Trinidad, dan Tobago telah menerapkan model tersebut dalam waktu yang cukup lama dengan variasi seperti otonomi (setiap kelompok memiliki pemerintah sendiri), integrasi (pemerintahan bersama oleh semua unsur komunitas), dan pembagian kekuasaan dalam badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, model gabungan dapat menampung keragaman dalam masyarakat secara lebih luas dibandingkan dengan model liberal. Seperti dikemukakan oleh Parekh (1997: 186) kelihatannya di permukaan masyarakat liberal dapat menampung keragaman budaya dengan memegang teguh prinsip toleran, dan mengutamakan hak-hak individu. Akan tetapi, sesungguhnya kaum liberal tidak dapat mengakomodasi keragaman secara utuh karena mereka tidak toleran dengan prinsip non-liberal. Misalnya di Amerika Serikat terdapat "ketegangan" antara keinginan pemerintah menerapkan prinsip sekulerisme dalam semua bidang yang dituangkan melalui perundang-undangan, telah meminggirkan keinginan masyarakat tertentu seperti kelompok Amish, Muslim, Protestan untuk mempertahankan tradisi keagamaan mereka (Macedo, 2000: 215).

Dalam pandangan liberal masih ada wacana dominasi mayoritas dan minoritas (Kymlicka, 1995). Adanya wacana ini, sebagai bukti juga bahwa dalam model liberal belum menampung seutuhnya kelompok minoritas sehingga masih memerlukan perjuangan untuk memperoleh kesetaraan dan kesamaan hak. Di sisi lain, dalam model *gabungan* istilah mayoritas dan minoritas telah dieliminasi melalui keterwakilan yang proporsional dalam kekuasaan negara.

Satu lagi model pluralism dan hubungan antar etnik yang unik terdapat dalam masyarakat Sarawak (Jehom, dalam Zawawi 2008:94-105). Secara historis keragaman etnik dalam masyarakat terjadi dalam tataran keseharian masyarakat, bukan dalam tataran politik seperti yang dibicarakan di atas. Sebelum

kedatangan kolonoal Inggris masyarakat Sarawak yang terdiri dari berbagai suku hidup dengan berburu. Dalam kondisi ini sering terjadi perang antar suku yang diawali dari perluasan wilayah berburu oleh suku Iban ke daerah lain seperti Bukitan menurut para ahli, perebutan wilayah atau perang antar suku ini merupakan kontak budaya (culture contact) awal antar suku. Meskipun pada awalnya ada permusuhan tetapi perseteruan ini diakhiri dengan persahabatan.

Kontak budaya ini terus berlanjut dengan hubungan perdagangan. Hubungan ini terjadi antar masyarakat asli dengan masyarakat Cina sebagai pendatang. Kedatangan masyarakat Cina yang sudah lebih maju dalam perdagangan berinteraksi dengan masyarakat Melayu yang masih tradisional (barter). Dalam kondisi ini, suku Iban sebagai suku yang menjadi perantara dua model perdagangan ini, sering berbelanja ke pasar Cina untuk membeli barang dagangan untuk dibawa ke masyarakat pedalaman. Lama-lama hubungan ini menjadi timbale, disamping orang Melayu Iban datang ke pasar Cina, juga orang Cina mengirim barang dagangan langsung ke pedalaman. Pola ini berjalan terus sampai datangnya colonial Inggris (1942-1963) yang datang dengan misionaris Kristen. Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah yang menerima masyarakat Melayu yang muslim di samping Cina Kristen. Tetapi upaya ini tidak mendapat sambutan dari masyarakat asli karena mereka dijadikan sasaran pemurtadan agama.

Pasca kolonial Inggris, hubungan antar etnik di Sarawak mengalami kemajuan. Antara lain melalui hubungan perkawinan antar suku, terutama antara suku Cina dengan Melayu. Dalam hal ini peran politik yang memberi batasan tertentu bagi masyarakat Cina untuk mendapat lahan dan izin usaha, justru membentuk pola hubungan antar etnik yang lebih positif yakni melalui perkawinan antar suku. Dengan melalui perkawinan lintas suku, masyarakat Cina mendapatkan kemudahan izin usaha dan lahan usaha dengan menggunakan nama keluarga yang Melayu. Melalui perkawinan ini masyarakat Cina dapat mengganti nama dan juga identitas lainnya sehingga menjadi lebih Melayu.

Karena banyaknya terjadi perkawinann antar suku, sehingga tidak ada lagi hambatan dalam interaksi antar golongan. Wujud toleransi ini berkembang dalam suasana public seperi sarana ibadah yang pada tempat yang berdekatan akan ditemukan sarana ibadah dari berbagai agama tanpa ada konflik.

Dalam segi ekonomi, masyarakat Cina lebih maju dari masyarakat Melayu atau Bumiputera. Namun ketidak seimbangan ini ditangani secara politik oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat asli dalam pengembangan ekonomi di satu sisi, dan member batasan yang ketat bagi masyarakat Cina. Secara politik kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan ketegangan social dan saling mencurigai. Tetapi justru dalam masyarakat Cina Sarawak, menjadi titik balik meningkatnya interaksi antar etnik yang baik. Masyarakat Cina berusaha memamfaatkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan masyarakat Melayu untuk memudahkan usaha ekonomi mereka. Sebaliknya, masyarakat Melayu atau Bumiputera dapat belajar banyak dari kesuksesan orang Cina dalam Ekonomi. Hubungan saling menguntungkan ini menjadikan interksi antar etnik di Sarawak menjadi baik.

Dari potret keragaman dalam masyarakat Sarawak dua hal yang dapat dipelajari sebagai model pengelolaan masyarakat majemuk. Pertama adalah kebijakan politik yang diprioritaskan kepada penghapusan ketidaksetaraan ekonomi melalui pemberian fasilitas kepada kelompok yang terbelakang, dan memberi batasan kepada kelompok yang maju. Dari sini akan terjadi proses silang yang maju akan membantu yang lambat dengan mengambil manfaat dari fasilitas yang diperoleh. Sementara, masyarakat yang lambat dapat belajar dari masyarakat yang maju. Kedua, adalah kebijakan politik yang memberi keleluasan kepada semua kelompok untuk beraktifitas sesuai dengan identitasnya di tataran publik, seperti sarana ibadah, pusat perbelanjaan dan lainnya. Pada pusat perbelanjaan misalnya setiap kelompok diberi fasilitas yang sama, sehingga masyarakat

dapat memilih tempat belanja sesuai dengan identitas kelompoknya.

Apapun pandangan yang dipakai, saat ini keberadaan multikulturalisme dalam suatu masyarakat atau negara tidak dapat dihindari. Terutama disebabkan arus imigrasi yang deras dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara atau antar negara. Sebagaimana dikemukakan dalam suatu studi oleh Program Pembangunan PBB (UN DP) yang dikutip oleh AustralianNews.com (16 Juli 2004),

There is no trade-off between diversity and state unity," the UN Development Program study said, offering up a salvo in the global debate over how to cope with multiple ethnic groups under a single national flag.

It said the quickened pace of international migration meant kultural diversity was "here to stay" and that countries had to accept and promote that diversity or face reduced freedom, development and stability.

"Choices like these-about recognising and accommodating diverse ethnicities, religions, languages and values-are an inescapable feature of the landscape of politics in the 21st century," it said. (United Nation report, 16 Juli 2004.Australian News.com)

Kenyataan saat ini menunjukkan dalam 185 negara di dunia hanya sedikit masyarakat yang homogen secara kultural, hampir semuanya merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya (Premdas, 2000). Dari semua negara multikultural tersebut ada dua bentuk penanganan kemajemukan masyarakat yaitu: *the power sharing variant* (Type 1) , dan *the kultural variant* (Type 2).

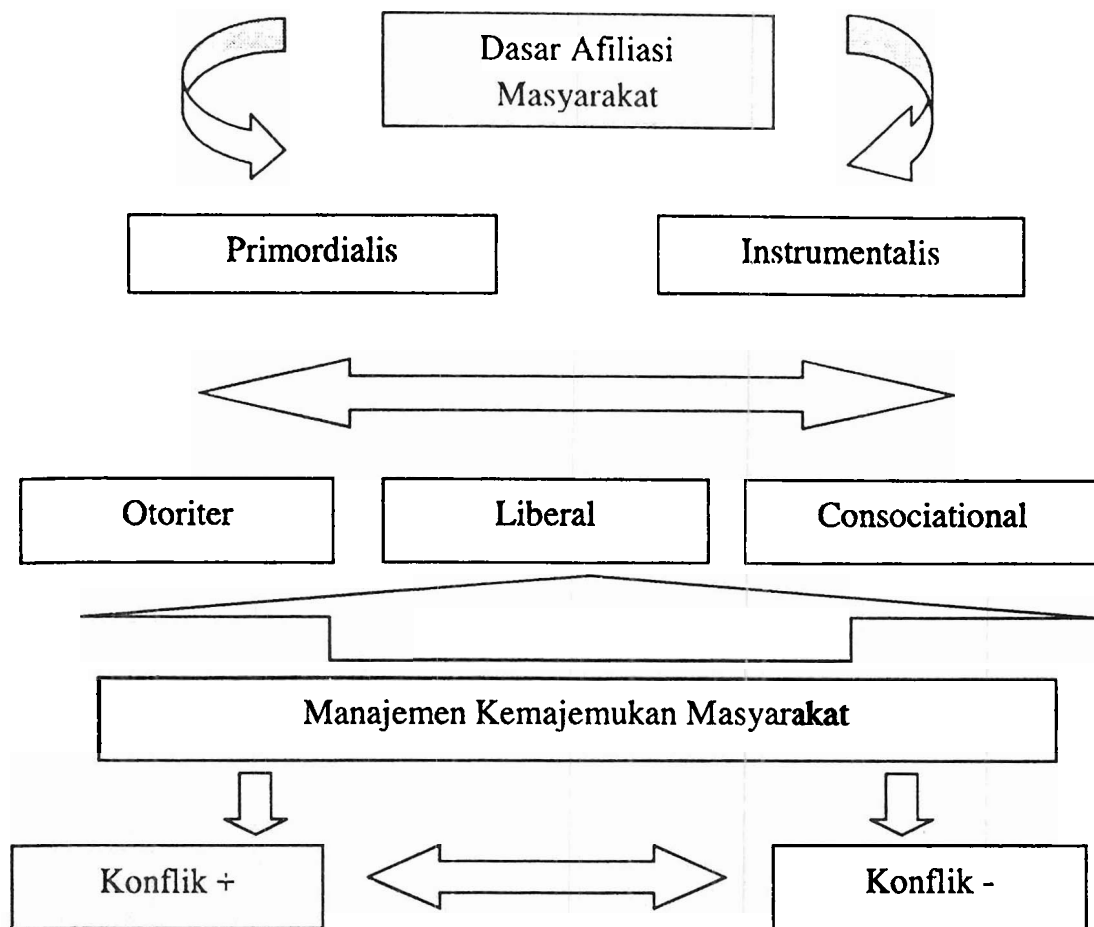
Dalam tipe 1 multikultural tidak hanya sekedar pengakuan simbol-simbol budaya, tetapi sampai pada persoalan mendasar dalam alokasi kekuasaan, hak-hak istimewa, dan sumber daya. Tipe 1 ini biasanya diterapkan di negara etno nasionalis yang terbagi secara kultural. Tipe ke 2 ditemukan pada negara yang beragam etnik dan budaya dengan adanya pengakuan resmi dari

negara untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok etnik dalam mempertahankan ciri budaya utama mereka. Sementara itu mereka tetap berpartisipasi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan yang diterapkan negara secara nasional. Memang akses multikultural berupa persaingan antar kelompok dapat muncul di kedua bentuk kebijakan itu, namun pada tipe ke 2 lebih besar kemungkinannya.

Dari uraian di atas dapat dirangkum hubungan antara perkembangan identitas kelompok yang membentuk keragaman di dalam masyarakat, dan manajemen kemajemukan oleh masyarakat. Keduanya bergerak dalam kontinum maksimal konflik (+) sampai ke minimal konflik (-). Identitas kelompok dapat terjadi dalam dua bentuk yakni, *primordial* (emosional, irrasional, berdasarkan ikatan persaudaraan, sulit berubah); dan *instrumental* (rasional, berdasarkan pilihan dan kepentingan, mudah berubah). Sedangkan penanganan kemajemukan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu *otoriter*, *liberal*, dan *consociational*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 9 di bawah.

Gambar ini memberikan sebuah kerangka hipotesis bahwa perkembangan identitas dalam masyarakat bergerak dari bentuk primordialis menuju bentuk instrumentalis. Keduanya ada di dalam masyarakat majemuk. Apakah keduanya dapat menimbulkan konflik atau tidak, tergantung kepada manajemen yang dipilih oleh masyarakat tersebut yang terbentang dalam tiga pilihan besar yaitu apakah otoriter, liberal, atau *consociational* (proporsional). Secara teoritis dihipotesiskan bahwa semakin demokratis (inklusif, adil, dan proporsional) penanganan kemajemukan semakin minimal konflik yang terjadi.

Dalam kaitan dengan pengelolaan masyarakat majemuk di Indoensia, ada beberapa perimbangan khusus yang sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam masa pemerintahan orde baru wacana multikultural tidak pernah terdengar dalam pembicaraan publik. Pandangan tentang keragaman masyarakat lebih banyak



Gambar 9. Hubungan antara Perkembangan Identitas Kelompok, Manajemen Kemajemukan, dan Potensi Konflik

dialihkan kepada pandangan politik kesatuan dan persatuan bangsa yang dipaksakan dengan kekuasaan. Keragaman bangsa seolah tenggelam dalam bahasa politik kesatuan. Menurut Suparlan (2001) berdasarkan fenomena tersebut, corak masyarakat majemuk Indonesia perlu dipelajari lebih dalam lagi mengingat potensinya yang dapat dimanipulasi secara social dan politik untuk memecah-belah kebangsaan Indonesia. Potensi yang destruktif itu disebabkan oleh beberapa hal:

1. Masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas sukubangsa yang didasari oleh sterotip dan parasangka, dan membawa kepada penjenjangan social secara primordial yang subjektif. Jika berkembang lebih lanjut akan menghasilkan stigma

- social dan pengambinghitaman oleh satu sukubansa terhadap suku bangsa lain.
2. Setiap suku bangsa me nempati sebuah wilayah sebagai tempat hidupnya. Secara tardisional wilayah ini diakui sebagai hak ulayat baik oleh kelompok tersebut atau kelompok lain. Konsep ulayat secara politik hubungan antar suku bangsa memiliki potensi pembedaan yang diskriminatif antara warga setempat dengan warga pendatang. Terjadi pendiskriminasian di mana pihak asal yang unggul, pihak pendatang tidak.
 3. ungkapan ungkapan seperti di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung atau adat suku bangsa setempat harus diikuti, merupakan ideologi politik sukubangsa. Ideologi politik ini menyebabkan terjadinyanag dengn konflik antara pendatang dan penduduk setermpat., bahkan penngusiran pendatang
 4. politik kebudayaan yang menekankan homogenitas, cenderung berpihkw pada penguasa

B. Kerangka Hipotetik Mengelola Konflik

Konflik merupakan keadaan yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat majemuk. Konflik merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan generator perubahan menuju masyarakat multikultural yang lebih demokratis. Untuk itu, perlu dikenali karakteristik konflik sehingga dapat dicarikan upaya mengelolanya.

Varshney (2002: 21) mengemukakan ada empat tradisi pendekatan untuk memahami konflik dalam masyarakat majemuk yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah esensialisme dan instrumentalisme, dan yang kedua adalah kostruktivisme dan postmodernisme.

Dalam pandangan esensialisme konflik yang terjadi dilihat dari dua argumen yaitu, primordial dan warisan kemanusiaan. Konflik diterjemahkan sebagai konsekwensi dari keterikatan karena pertalian darah dan kesamaan keturunan. Sedangkan,

dalam pandangan instrumental, etnisitas tetap menjadi poin utama dalam konflik, tetapi tidak disebabkan kekuatan ikatannya melainkan karena dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Para elit melihat potensi ikatan yang kuat dalam etnik (kelompok) sebagai cara memobilisasi massa untuk mencapai tujuan mereka.

Dua pandangan lain adalah konstruktivisme dan postmodernisme, merupakan pandangan kontemporer tentang pembentukan identitas dan akar konflik. Kedua pandangan ini melihat formasi identitas dan konflik sebagai fenomena modern (sebagai lawan dari tradisional). Dalam pandangan tradisional identitas dan konflik dilihat sebagai persoalan lokal dan skala kecil dan tidak melibatkan institusi. Sebaliknya dalam pandangan kontemporer, kesadaran masyarakat lebih luas lagi sehingga membentuk komunitas yang lebih luas. Contoh identitas dalam masyarakat modern adalah bentuk "komunitas terbayang" seperti dalam gagasan Anderson (2000) yakni masyarakat atau komunitas yang terbentuk karena teknologi dan sistem ekonomi modern.

Sehubungan dengan konflik dalam masyarakat modern, kalangan postmodernis berpendapat bahwa dalam ikatan masyarakat modern ada relasi kekuasaan yang berimplikasi dalam pembentukan pengetahuan. Konstruksi identitas kelompok berasal dari "narasi" yang dibuat oleh kelompok elit, dan terpusat pada kekuasaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami konflik para pengamat memusatkan perhatian kepada pencarian dan dekonstruksi relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan bagi kalangan konstruktivis, konflik saat ini adalah akibat dari pemerintahan kolonial atau rejim masa lalu.

Pendekatan esensialis dapat dipelajari dalam analisis yang menjelaskan konflik terjadi karena motivasi primordial. Motivasi bisa dalam bentuk pembentukan identitas social atau kesamaan genetik. Dalam psikologi modern dijelaskan bahwa identitas sosial berkembang dalam kelompok dengan situasi yang sama yakni di satu sisi adanya loyalitas, pengorbanan pada kelompok,

dan persaudaraan di dalam kelompok, di sisi lain ada kebencian pada orang di luar kelompok. Ketika terjadi ancaman dari luar, identitas ini menguat dan merasakan "nasib" yang sama. Demikian juga dari kesamaan genetik akan membentuk perasaan bersama dalam bentuk etnosentrisme.

Untuk melihat kasus terbentuknya identitas menurut teori ini dapat dilihat pada penelitian Shaobin Yu dan Heungsuk Choi (2012) tentang perkembangan identitas komunitas Cina Korea (*Korean Chinese*) yang bermigrasi dari daratan Cina ke tanah leluhurnya Korea Selatan. Selama ribuan tahun etnik Korea telah menempati tanah daratan Cina (Manchuria), karena kedekatan wilayah wilayah yang membuat perpindahan penduduk di masa lalu begitu mudah. Namun ketika terjadi perkembangan sejarah nasional di Cina Manchuria dengan munculnya gagasan tentang identitas nasional, maka keberadaan masyarakat Korea di Cina menjadi perdebatan. Namun dalam perjalanan sejarah di Cina bersamaan dengan berakhirnya perang Korea dan berakhir pula persaingan loyalitas, maka ada kebijakan dari pemerintah Cina untuk memperlakukan aturan yang mengakui keberadaan etnisitas dan penggunaan bahasa dan adat istiadat local. Pada situasi ini masyarakat etnis Cina Korea mendapat posisi sebagai masyarakat minoritas di tengah mainstream Cina. Bersamaan dengan itu, ada keinginan dari etnis Cina Korea untuk kembali ke tanah leluhur di Korea Selatan, dengan membawa harapan untuk melebur sebagai orang Korea Selatan, karena di Cina mereka dianggap warga imigran dari Korea selatan. Tetapi harapan ini hanya menjadi mimpi, karena di tanah leluhurnya sendiri mereka adalah pendatang. Akhirnya dalam kondisi ketidakjelasan loyalitas dan identitas ini, masyarakat Cina Korea membentuk identitas sendiri, yang berkembang dari solidaritas sesama Cina Korea yang mengalami diskriminasi dan keterasingan baik di Cina atau di Korea Selatan.

Sebaliknya, pandangan yang melihat konflik dalam konteks relasi kekuasaan tampak antara lain dalam analisis Valery Thiskov (1991) yang dibaginya ke dalam tiga kajian teori. Pertama, "*social groupings and socio-economic interest*". Dalam

pandangan ini, konflik dipicu karena adanya pemilikan factor-faktor ekonomi tanpa berdasarkan proses yang legal oleh suatu kelompok etnik yang memiliki keistimewaan sosial. Proses ini membentuk pemisahan kelas dalam masyarakat, dan bahkan juga diskriminasi berdasarkan perbedaan kelas yang pada akhirnya menjadi pemicu konflik antar etnik.

Teori yang kedua, menjelaskan kemungkinan penyebab konflik etnik dari sudut mekanisme psikologi sosial dan perilaku. Hal ini muncul dari kelompok yang menempati status sosial rendah dan cenderung menjadi objek diskriminasi dalam suatu lingkungan yang dominan. Karena pengalaman yang diderita sering kali mereka memperlihatkan ketakutan akan kehilangan eksistensinya sehingga membawa kepada perilaku-prilaku yang mengandung bibit konflik. Reaksi ini disebut sebagai reaksi terhadap bahaya dugaan, dan merupakan perasaan-perasaan irrasional.

Teori yang ketiga, melihat kemungkinan terjadi konflik juga muncul dari perasaan irrasional, berupa ketakutan kehilangan kebermaknaan dan kebahagiaan dalam kelompok. Biasanya pengalaman ini dirasakan oleh masyarakat yang mengalami trauma sosial karena mendapat perlakuan tidak adil sepanjang sejarah. Pengalaman ini dialami oleh rakyat dan kelompok etnik semasa pemerintahan Uni Sovyet, yang selama bertahun-tahun berada dalam perasaan kebersamaan karena trauma. Ketika lepas dari tekanan, mereka berusaha mencari upaya penyembuhan pengalaman traumatis dengan memperkuat kelompok etnik. Dari kelompok etnik muncul gagasan-gagasan dan program-program politik yang mengarah kepada pembentukan negara sebagai upaya mempertahankan identitas kelompok.

Konflik juga dapat terjadi karena kebijakan yang diskriminatif sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Analisis ini terlihat dalam tinjauan Richardson Jr & Sen (1996). Terjadinya konflik etnik dapat dilacak dalam dua hal: 1) dari peran etnisitas dalam memobilisasi, menstruktur organisasi yang bersaing dalam masyarakat untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol

dalam negara; dan 2) konflik terjadi karena peran pemimpin menggunakan strategi pemisahan etnik untuk memperoleh dukungan politik. Apabila sebuah kelompok meraih posisi kekuasaan dan kontrol (kelompok dominan), maka pemimpinnya akan memperlakukan sistem yang diskriminatif dalam membagi-bagikan aset ekonomi kepada kelompok yang disukai dan membatasi aset kepada kelompok yang tidak disukai. Pengalaman diskriminatif diperkuat dengan aspek-aspek legal dan kebijakan. Hal ini berlangsung lama sehingga membentuk identitas sosial adanya kelompok dominan dan kelompok minoritas. Seiring dengan pembangunan ekonomi yang biasanya tersebar secara tidak merata, membuat masyarakat yang mengalami diskriminasi semakin terasing dan semakin memperkuat identitas sosialnya. Dari sini siklus ini akan berbalik, berupa upaya etnik yang tertekan untuk berjuang memperoleh posisi yang sama dengan kelompok dominan.

Dengan cara yang berbeda, Horowitz (1998:1-4) mengelompokkan teori tentang konflik dalam dua kategori besar yakni: "*Hard Theory*" dan "*Soft Theory*". yang didasarkan pada hakikat afiliasi kelompok dan tujuan perilaku konflik. *Hard theory* melihat konflik dan perkembangan identitas dari sisi primordialis dan ikatan emosi yang cenderung irrasional. Sebaliknya, *soft theory* melihat afiliasi kelompok dan penyebab konflik karena pertimbangan dan pilihan rasional dan reward material. Bila *hard theory* tergolong pandangan esensialis maka *soft theory* termasuk pandangan instrumentalis. Keduanya dilihat dalam satu kontinum yang terdiri atas sepuluh kelompok teori yang digunakan para ahli untuk menjelaskan konflik sebagai berikut.

1. Pandangan yang menyatakan etnisitas merupakan afiliasi primordial yang ada dalam rentang waktu yang lama sehingga menimbulkan kesadaran diri kolektif. Kesadaran ini bersamaan dengan kesadaran adanya "orang lain" yang satu ketika karena mekanisme tertentu berubah menjadi konflik.
2. Adanya kebencian masa lalu yang menghidupkan konflik sekarang.

3. Konflik etnis terkait dengan perang budaya .
4. Konflik etnis disebabkan modernisasi. Karena modernisasi orang menginginkan sesuatu yang sama, dan sumber yang ada tersebar secara tidak merata.
5. Konflik etnis terjadi karena persaingan antara kelompok-kelompok yang terpisah secara etnis dari golongan pekerja, dan antara pengusaha dan pengguna yang berbeda secara etnis.
6. Etnisitas merupakan kelompok yang berperan memberi jasa. Konflik terjadi ketika kelompok memberi keistimewaan kepada anggotanya.
7. Sejalan dengan teori ke 6, pada kondisi politik yang berorientasi etnis dikembangkan muncul suatu permainan kordinasi, dimana anggota suatu kelompok memberi perhatian kepada identitas etnisnya dengan pemikiran kelompok lain juga melakukan hal yang sama.
8. Sebagian ahli berpendapat bahwa konflik terjadi karena kompetisi elit dan adanya pemanfaatan kelompok etnik.
9. Adanya teori pilihan rasional yang menganggap bahwa konflik diperlukan atau tidak dapat dihindari ketika khawatir melihat adanya motif-motif dan tindakan dari pihak lain-yang selama ini bermusuhan - menimbulkan rasa tidak aman.
10. Teori evolusi tentang konflik, yang menyatakan konflik terjadi karena dorongan emosional dan berani mati untuk kepentingan kelompok.

Dapat disimpulkan lagi bahwa analisis dari esensialis dan instrumentalis lebih bersifat mikro dengan bertolak dari kondisi internal kelompok yang berada dalam situasi konflik, sedangkan analisis dari sudut pandang konstruktivis termasuk postmodernisme lebih ditujukan kepada hal makro yang mempengaruhi kondisi-kondisi internal kelompok sehingga terlibat ke dalam konflik. Bahkan kalangan postmodernis lebih ekplisit lagi

mendefinisikan faktor eksternal dengan istilah hubungan kekuasaan (relasi power).

Masalah lain yang menjadi pertanyaan semua pihak yakni: mengapa konflik menjadi sangat mengakar dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sebuah buku dari IDEA yang diedit oleh Peter Haris dan Ben Relly (2000: 35) berjudul "Demokrasi dan konflik Yang Mengakar" mengemukakan bahwa ada tiga faktor utama yang memicu konflik berlarut-larut. Pertama, faktor ekonomi secara luas. Kehancuran ekonomi selalu diikuti oleh kemunculan konflik antar etnik. Contoh konkret dari konflik ini seperti gerakan pasca ekonomi terpimpin di Eropa Timur, dan sebagian Asia dan Afrika. Kondisi seperti ini disebut dengan "ketidakamanan ekonomi". Kedua, faktor yang menyangkut kultur, yakni menyangkut isu-isu klasik tentang hak-hak bahasa minoritas atau kebebasan beragama. Kebanyakan negara multietnik pada waktu-waktu terakhir ini telah mengalami isu-isu ini, yakni ketika tuntutan akan otonomi kultural meningkat dan kebijakan asimilasi diterima secara curiga. Dan ketiga, konflik terjadi karena perselisihan mengenai wilayah. Perselelisihan ini sangat mungkin melebur dengan pertikaian etnik ketika kelompok etnik terkonsentrasi secara teritorial.

Marta-Reynal Querol (2003), peneliti dari Bank Dunia, menambahkan faktor penyebab konflik menjadi mengakar karena sebelumnya sudah terbentuk polarisasi yang kuat berdasarkan agama dan kepercayaan. Bahkan penelitian menunjukkan polarisasi agama merupakan faktor yang lebih berpengaruh dalam membentuk pemisahan sosial dibanding perbedaan bahasa. Sedangkan Francesco Casseli & Willbur Coleman (2001), menambahkan bahwa dalam setiap masyarakat majemuk selalu ada potensi konflik karena di dalam masyarakat ada kekayaan negara yang menjadi akar persaingan. Konflik pecah menjadi pertikaian ketika kekayaan dikuasai oleh satu kelompok yang menutup afiliasi dengan kelompok lain.

Konflik akan menjadi lebih dalam lagi bila konflik itu diciptakan atau diorganisasikan secara sistematis untuk kepentingan kelompok tertentu. Konflik yang terjadi di

Ruwanda antara suku Tutsi dan Hutu (Sadowsky, 1998) adalah contoh konflik yang diorganisasikan. Pada waktu sebelum penjajahan Belgia, distrik dipimpin oleh Hutu tetapi dalam aturan hukum yang dibuat Tutsi. Sepertiga pimpinan Rwanda adalah Hutu. Kedatangan bangsa Belgia mengubah struktur yang sudah ada dengan mengganti semua pimpinan yang non-Tutsi dengan orang Tutsi. Kebijakan ini didukung dengan berbagai peraturan yang menguntungkan satu pihak merugikan pihak lain. Bahkan Belgia memberikan dukungan kepada warga Tutsi untuk meningkatkan eksploitasinya terhadap warga Hutu. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam berbagai bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keadaan ini terus berlanjut setelah Belgia meninggalkan negeri Rwanda.

Contoh lain adalah konflik Kalimantan (Van Klinken, 2000). Sebagian dari faktor-faktor penyebab berlarutnya konflik tersebut adalah karena keterlibatan pihak tertentu yang mengorganisir konflik untuk kepentingan mereka. Pihak-pihak ini ingin mempertahankan eksistensi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Keuntungan ini dinikmati secara terbatas oleh kelompok tertentu. Sejalan dengan uraian tentang penyebab konflik yang dikemukakan di atas, Stewart (2005) merangkum bahwa penyebab konflik dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan politik.

Analisis budaya oleh Stewart dirujuknya kepada pemikiran Huntington tentang "pertarungan budaya". Sama halnya dengan perepecahan global terjadi karena pertarungan budaya barat dengan muslim, maka demikian pula peristiwa dalam negeri seperti di Yugoslavia dan Rwanda yang disebabkan oleh pertikaian antar suku. Konflik yang mengandung dimensi budaya terjadi ketika masing-masing kelompok yang bermusuhan melihat diri masing-masing sebagai anggota budaya yang ingin memperoleh otonomi budaya. Pandangan ini dalam teori antropologi disebut dengan primodialisme, yang mungkin terbentuk karena warisan dan bisa juga dibentuk oleh kekuasaan karena kepentingan politik atau ekonomi penguasa (elit).

Selanjutnya analisis ekonomi untuk menjelaskan konflik, Stewart melihatnya dalam 4 hipotesis ekonomi. 1) motivasi kelompok dan kesenjangan horizontal. Sebagian besar konflik dalam negeri terdiri dari perang antar kelompok (kelompok yang ingin bebas atau mengambil alih kekuasaan dan kelompok yang menentangnya). Kelompok ini dipersatukan oleh tujuan bersama masing-masing kelompok. Setiap kelompok memiliki identitas budaya yang sama. Tampaknya analisis Stewart ini dapat diterapkan untuk melihat kasus konflik seperti di Irak menjelang kejatuhan Saddam Husein, (seperti suku Kurdi, kelompok syiah, kelompok sunni) atau di Libia (3 bulan awal 2011) yang menuntut pergantian kekuasaan dari Kadhafi. Konflik menjadi luas, karena ada kelompok yang dirugikan oleh pihak yang berkuasa akhirnya bergabung dengan pihak yang menghendaki pergantian kekuasaan melawan pihak yang mempertahankan kekuasaan. Perbedaan budaya diperkuat dengan kesenjangan ekonomi dan politik yang menjadikan konflik semakin tajam karena dilandasi kebencian.

Terakhir, pelengkap factor budaya dan ekonomi, factor politik juga turut mempertajam konflik dan memicu kekerasan. Faktor politik umumnya merupakan kombinasi dari factor budaya dan ekonomi. Salah satu elemen politik yaitu kekuatan negara yang represif dapat mematahkan konflik. Tetapi dalam beberapa kasus sebagaimana analisis Ronald Fransisco (2009) menjelaskan factor politik dapat memicu konflik ketika tidak adanya saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, misalnya dalam system pemerintahan parlementer ada kekuasaan presiden dan perdana menteri. Keduanya berjalan dalam kondisi saling "menyenangkan satu sama lain, kemudian legislator juga lemah karena dibawah kendali perdana menteri. Dalam keadaan ini jalaran adalah pilihan terbaik. Dari analisis ini, memang factor politik tidak penyebab utama memicu konflik tetapi ketiadaan saluran penyelesaian dari pihak negara, menyebabkan konflik semakin tajam.

Konflik etnik bukanlah hal yang baru, begitu juga di Indonesia. Sejarah sudah membuktikan bahwa ketegangan antar

suku atau pemeluk agama yang berbeda, telah ada bersamaan dengan perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Bahkan penjajah Belanda mencoba memanfaatkan perbedaan etnik di satu daerah untuk memperluas kekuasaannya. Misalnya kita bisa belajar dari kenyataan sejarah di Kalimantan Selatan (Sjamsuddin, 2001: 261) yakni saat persaingan kecil terjadi antar kelompok (etnik dan juga agama), Belanda justru memanfaatkannya untuk memperluas ekspansi kolonial.

Konflik menjadi berlarut ketika faktor ekonomi, budaya, geopolitik, sejarah, dan ketidakadilan sosial tidak terpecahkan, dan bahkan dijadikan alasan untuk terus dalam situasi konflik oleh kelompok-kelompok elit yang berniat mengambil keuntungan dari situasi konflik. Walaupun demikian, bukan berarti konflik antar etnik tidak dapat ditengahi atau dicarikan solusi. Untuk itu diperlukan pemahaman yang tepat tentang persoalan mendasar dalam sebuah kelompok etnik dan hubungan antar kelompok. Tidak mungkin menyamaratakan kasus semua konflik etnik.

Perbedaan dan konflik ras atau etnik sangat terkait dengan konstruksi sosial yang melatarbelakanginya (Chang & Dodd, 2001). Perbedaan ras dan etnik dalam kedudukan superior atau inferior, merupakan produk sosial yang diagendakan untuk memenuhi kepentingan sosio politik kelompok yang dominan. Demikian juga kategori etnik dan ras dalam masyarakat, bukan sesuatu yang kaku melainkan berubah-ubah sesuai dengan konteks sosial politik dari suatu masyarakat pada waktu tertentu. Perbedaan etnik dan ras tidak inherent membawa konflik, tetapi perbedaan mendapat makna sosial tentang hirarki yang kemudian membawa situasi ke dalam konflik ketika kelompok-kelompok yang terbagi tidak dapat bernegosiasi lagi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebuah konflik akan dapat ditangani bila konstruksi sosial yang melatarbelakanginya dapat dijernihkan.

Kebijakan untuk menjernihkan konstruksi sosial itu terbentang dalam satu kontinum yang mulai dari kutub otoriter di satu sisi sampai pada kutub demokratis di sisi yang lain

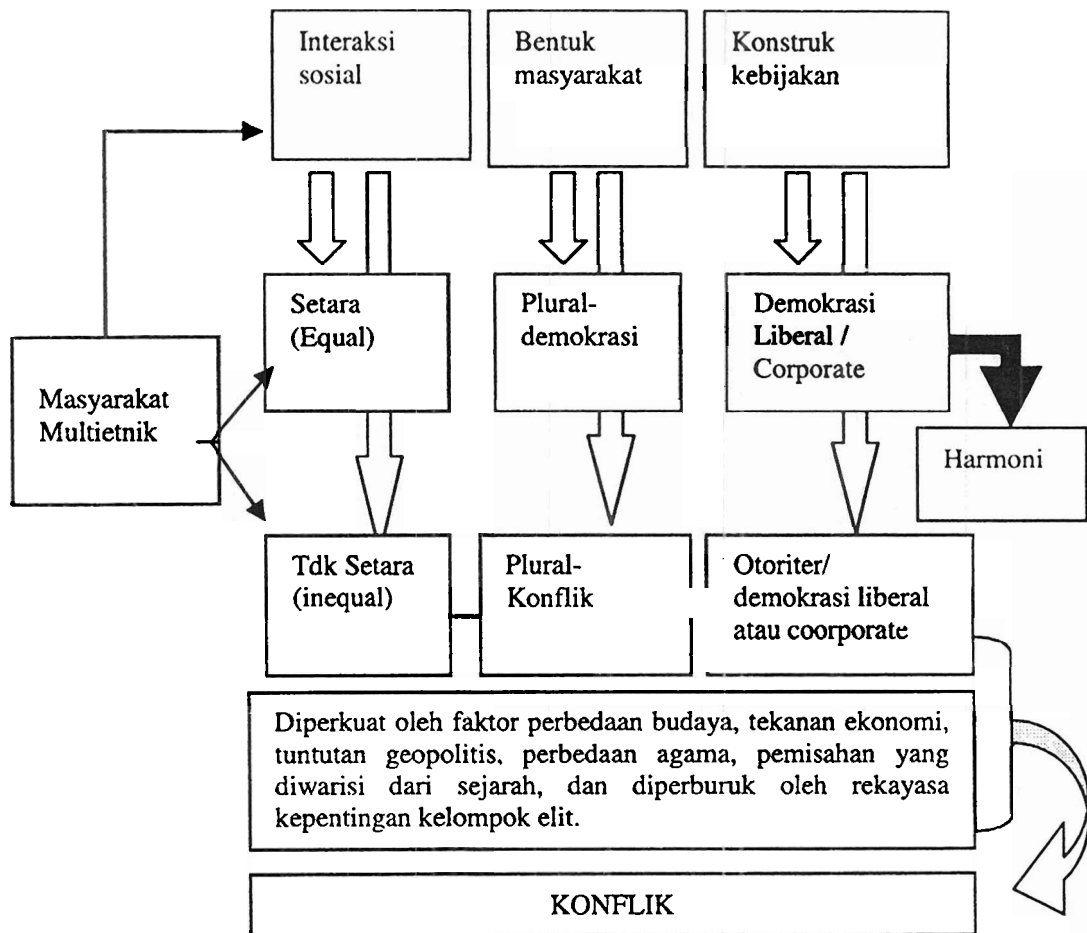
(Suparlan, 2000: 2). Masyarakat majemuk otoriter dikendalikan dengan kekuasaan keras dan militeristik. Ciri-ciri masyarakat ini adanya kekejaman dan kekerasan oleh negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, karena penguasa menekan segala bentuk penentangan atau ketidakpatuhan warganya terhadap tindakan eksploitatif yang dilakukan negara. Sedangkan dalam kutub yang lain, masyarakat hidup dalam suasana masyarakat sipil yang demokratis, yaitu ketika kelompok minoritas diberi perlindungan terhadap hak-haknya untuk dapat hidup di tengah kelompok yang dominan. Di samping itu, masyarakat ditata dengan hukum yang berlaku sama terhadap semua orang.

Selain menciptakan sistem yang demokratis, konflik juga dapat dihindari dengan mencermati faktor-faktor positif dalam masyarakat majemuk yang bersifat akomodatif dan kerja sama, bisa dalam bentuk asimilasi maupun bentuk pluralisme (Marger, 1985:87), dan berusaha mengatasi faktor negatif yang muncul dalam bentuk masyarakat yang dipilih.

Lebih detail kedua bentuk ini dijelaskan dengan model yang dilihat dalam dua dimensi: Pertama, mempertahankan identitas budaya sendiri, dan kedua, menyesuaikan dengan identitas budaya dominan (Hjerm, 2000: 357). Dari kedua dimensi ini lahir bentuk hubungan antar kelompok berupa, 1) integrasi yakni mempertahankan identitas dan sekaligus mengadopsi budaya dominan); 2) asimilasi yaitu menolak mempertahankan identitas budaya sendiri, tetapi menyesuaikan diri budaya dominan; 3) segregasi yaitu dengan mempertahankan identitas, tetapi menolak untuk mengambil budaya dominan; dan 4) eksklusif dan individualis, yaitu bentuk yang mencari bentuk baru tetapi tidak mempertahankan identitas sendiri, tidak juga menyesuaikan diri dengan budaya dominan.

Uraian tentang konflik di atas dapat dirangkum dalam satu diagram yang secara hipotetik menggambarkan hubungan antara bentuk interaksi sosial dengan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat majemuk. Dalam interaksi masyarakat yang setara (tidak ada diskriminasi antar anggota masyarakat) maka diperkirakan bentuk masyarakat berupa multikultural

yang demokratis. Sebaliknya jika interaksi antar anggota masyarakat tidak setara (mengandung unsur-unsur diskriminatif), maka diperkirakan bentuk masyarakat berupa masyarakat plural yang berpotensi konflik. Selanjutnya dimungkinkan ada dua kebijakan untuk menangani konflik tersebut yaitu, Otoriter (cenderung mempertahankan konflik), dan demokratis (cenderung menghapus konflik)



Gambar 10 Kerangka Hipotetik Hubungan Masyarakat Majemuk

C. Daftar Bacaan

- Anderson, Benedict (2000) *Imagined Community (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Jakarta: Insist.
- Chavez, Alicea & Guido-DiBrito, Florence (1999) *Racial and Ethnic Identity Development, New Direction for Adult and*

- Continuing Education*, No 84, Winter 1999. New Jersey: Jossie Bass Publication.
- Egay, Kevin (2008) The significance of Ethnic Identity Among The Penan Belangan Community in the Sungai Asap Resettlement Scheme. Dalam Zawawi Ibrahim (eds) *Representaion, Identity and Multiculturalisme in Sarawak*. Kualalumpur Malaysia: Vinlyn Press Sdn.
- Horowitz, Donald (1981) Ethnic Identity. Dalam Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel (eds) *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press
- Harris, Peter & Relly, Ben (2000) *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International IDEA
- Hjerm, Mikael (2000) Multikulturalism Reassessed. *Citizenship Studies* . Vol 4 Number 3, pp 357-381.
- Horowitz, Donald (1981) Ethnic Identity. Dalam Glazer, Nathan & Moynihan, Daniel (eds) *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press
- Jehom, Jeffrey Welney (2008) Ethnnc Pluralism and Ethnic Relations in Sarawak. Dalam Zawawi Ibrahim (eds) *Representaion, Identity and Multiculturalisme in Sarawak*. Kualalumpur Malaysia: Vinlyn Press Sdn.
- Kawaguchi, Shozo (2003) Ethnic Identity Development and Collegiate Experience of Asian Pacific American Students: Implication for Practice. *Naspa Journal* Vol 40. Spring 2003.
- Kendall, Diana (2003) *Sociology in Our Time*. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning
- Kymlicka, Will (2002) *Kewargaan Multikultural (edisi terjemahan)*. Jakarta: LP3S
- Lee,-Jennifer-Serena (2000) Ethnic Identity Development and the Influence of Children's Literature. *Dissertation-abstract-international*. Vol 61 (I-B): 564.
- Mooradian, Moorad (1996) The Meaning of Ethnic Identity. *The Pacific American Review*. Vol 2, Winter 1996: 2-9.
- Macionis, John (1993) *Sociology*. New Jersey: Englewood Cliffs.

- Mendoza , Manuel & Napoli, Vince (1990) *Systems of Society*. Toronto: D.C Heath and Company
- Marger, Martin (1985) *Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Macedo, Stephen (2000) *Diversity and Distrust: Civic Education in a Multikultural Society* . Cambridge: Harvard University Press.
- Parekh, Bhikhu (1997) "National Culture and Multikulturalism", dalam Thompson, Kenneth (ed) *Media and Kultural Regulation*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication
- Francisco, Ronald A (2009) *Dynamics of Conflict*. Lawrence KS: Springer Sciences Bussines Media LLC
- Sjamsuddin, Helius (2001) *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sadowsky, Yahya (1998) *Ethnic Conflict. Foreign Policy*, Summer 1998 11/12.
- Shaobin Yu & Haungsuk Choi (2012) *Korean Chinese's Paradoxial Ethnic Identity and Loyalty*. Paper Presented at 2012 Interantional Conference on Public Organization (ICONPO). Korea University.
- Suparlan, Parsudi (2000) *Masyarakat Majemuk dan Perawatannya. Antropologi Indonesia No: 63/2000*.
- Stewart, Frances (2005) "Sebab-Sebab Dasar Sosial Ekonomi dan Konflik Politik dengan Kekerasan", dalam Anwar, Dewi Fortuna dkk (eds) *Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor-LIPI
- (2004) *Human Development Report: Kulturally Liberty in Today's Diverse World*. United Nations Development Programme.
- Varshney, Ashutosh (2002) *Ethnic Conflict and Civic Life*. New Haven & London: Yale University Press
- Van Den Berghe, Pierre (1981) *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier

Wiriaatmadja, Rochiati (1992) Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional. *Disertasi*. Program Pascasarjana IKIP Bandung

Esman, Milton (2000) Ethnic Pluralism: Strategies for Conflict Management. *Paper presented for Center for Development Research: Facing Ethnic Conflicts (14-16 December 2000)*.

Internet:

- Premdas, Ralph (2000) *Public Policy and Ethnic Conflict*. Management of Social Transformation, Discussion Paper Series No 12. Tersedia online dalam www.unesco.org/most/premdas (akses 3 Maret 2004).
- Casseli, Francesco & Coleman, Willbur (2002) *On the Theory of Ethnic Conflict*. Tersedia online dalam <http://posteconomic.harvard.edu/faculty/casseli> (akses 3 Maret 2004).
- Chang, Heewon & Dodd, Timothy (2001) *International Perspective on Race and Ethnicity*. Tersedia online dalam www.edchange.org (akses 3 Maret 2004).
- Galkina, Hellen (1990) *Theoretical Approaches to Ethnic Identity*. Tersedia dalam www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian (akses 16 Februari 2005).
- Guanipa, Carmen & Guanipa, Jose (1998) *Ethnic Identity and Adolescent*. Tersedia dalam www.edweb.sdsu.edu/people/Cguanipa/ethnic (akses 16 Juli 2004)
- Yoon, In Jiin (1988) An Essay on Ethnicity. Tersedia online dalam <http://web.korea.ac.kr/~yoonin/worldrace> (akses 3 Maret 2004).
- Querol, Marta-Reynal (2003) *Ethnicity, Political System and Civil War*. Tersedia online dalam www.worldbank.org/research/conflict (akses 8 November 2005)
- Ricardson Jr, John & See, Shinjinee (1996) *Ethnic Conflict and Economic Development: A Policy Oriented Analysis*. Tersedia online dalam www.american.edu/jrich/Richardson/ethnic-conflict (akses 16 Februari 2005)

- Tishkov , Valery (1991) *Ethnic Conflicts in the Context of Social Science Theories* . Tersedia online dalam www.unupress.edu/unupbooks/uu12ee (akses 16 Juli 2004).
- Van Klinken, Gerry (2000) *Ethnic fascism in Borneo*. Tersedia online dalam www.insideindonesia.org (akses 2004).